

# SKRIPSI

## PENGARUH PERILAKU KELOMPOK TANI TERHADAP KREDIT MACET PROGRAM PENGEMBANGAN KECAMATAN (PPK) DESA TANAH BEKALI DI KECAMATAN PANGEAN KAB. KUANTAN SINGINGI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mengikuti Ujian Oral Comprehensif  
Sarjana Lengkap Pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri  
Sultan Syarif Kasim Riau



OLEH

**GUSTI NINGSIH**  
NIM : 10671004726

<b>MILIK</b>	
PERPUSTAKAAN UIN AL - JAMIAH	
SULTAN SYARIF KASIM RIAU	
NO.	2011 132 MEH
TGL.	2011 Juli 2011
PARAF.	<i>[Signature]</i>

JURUSAN MANAJEMEN SI  
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
PEKANBARU 2011

PENGARUH PERILAKU KELOMPOK TANI TERHADAP KREDIT MACET  
PROGRAM PENGEMBANGAN KECEMATAN (PPK) DI DESA TANAH BEKALI  
KECAMATAN PANGEAN. KAB KUANTAN SINGINGI

ABSTRAK

Oleh: Gusti ningsih

*Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kredit macet program Pengembangan kecamatan (PPK) perilaku kelompok tani Desa Tanah Bekali Pangean, serta untuk mengetahui usaha bagi pihak pelaksana PPK dalam mengatasi kredit macet/tunggakan tersebut. Metode pengambilan pengumpulan data dengan metode interview, dan kuesioner. sampel yang diambil sebanyak 38 orang responden. Analisis Data dengan menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Kemudian dari hasil penelitian tersebut di analisis menggunakan Regresi linier berganda.*

*Dari analisis yang dilakukan dengan menggunakan program SPSS, terbukti variabel budaya (X1), kepribadian (X2), dan kelas social (X3) secara Simultan mempunyai pengaruh signifikan terhadap kredit macet (Y). dengan  $F_{hitung}=5.985$  lebih besar dari  $F_{tabel}=3.32$ . secara parsial variabel budaya (X1) mempunyai pengaruh signifikan terhadap kredit macet (Y) karena  $T_{hitung} > T_{tabel}$  sedangkan (X2, X3) tidak berpengaruh signifikan terhadap kredit macet (Y) karena  $T_{hitung} < T_{tabel}$ , selanjutnya angka adjusted R square (Adj R) adalah sebesar 0.346 menunjukkan bahwa 28.8% pengaruh kredit macet (Y) program pengembangan kecamatan (PPK) perilaku kelompok tani desa tanah bekali bisa diterangkan dengan variabel budaya (X1) kepribadian (X2) dan kelas social (X3) sedangkan sisanya 66,62% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini*

*Kata Kunci : Kredit macet, budaya, Kelas social, dan Kepribadian.*

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr.Wb*

Segala puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan hidayanya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul "**Pengaruh Perilaku Kelompok Tani Terhadap Kredit Macet Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Desa Tanah Bekali Di Kecamatan Pangcan Kab. Kuantan Singingi**". Penulisan skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi, pada Fakultas Ekonomi dan Ilmi Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam dalam penulisan ini masih jauh dari kesempurnaan masih banyak kelemahannya. untuk itu penulis menerima dengan senang hati segala kritikan dan saran-saran yang sifat yang membangun demi kesempurnaan tulisan ini.

Dalam penyelesaian skripsi ini penulis tak lepas dari bantuan dari berbagai pihak yang ikut mendukung dalam pembuatan skripsi ini. Oleh sebab itu pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat :

1. Ayahanda dan ibunda (Darus Salim dan Samsidar) yang membesarkan, mendidik, dan memotivasi dengan penuh kasih sayang mulai dari kecil sampai sekarang serta bantuan materil dan Do'a yang tulus yang tak pernah henti-hentinya, serta yang selalu memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya.

2. Bapak Drs. Azwar Harahap.M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak DR. Mahendara Romus, Sp, M.Ec. selaku ketua Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dan ibu Lusiawati .SE.MBA selaku sekretaris Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Trian Zulhadi, SF, M. Ec selaku Dosen Pembimbing I, yang telah membimbing dan memberikan arahan selama pembuatan tugas akhir.
5. Bapak Drs. H. Kodri H. Nawawi, MA selaku Dosen Pembimbing II, yang dengan kesabaran dan kebaikannya telah memberi bimbingan arahan kepada penulis.
6. Dosen-dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial yang telah melimpahkan khasanah ilmu pengetahuan kepada penulis selama menjadi mahasiswa, dan segenap karyawan dan kayawati Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan pelayanan yang baik kepada penulis.
7. Abang dan kakak ( ihen, alis,sardi dan kak ifis iyul) terima kasih atas bantuan materil dan do'a selama penulis menjadi mahasiswa.
8. Mak tuo, mamak, etek, pak etek dan adik-adikku, (Yosta, Ires, Dekis, dan destri) serta ponakanku yang lucu-lucu (Afdim dan Fakhira) terima kasih atas rasa cinta, kasih sayang serta perhatian yang telah kalian berikan.

9. Teman-teman Jurusan Manajemen angkatan 2006, wita, dewi, Ani, Jana Ria, Mela, Susi, Nia, Ruzi, Dona, joni, Anto, Fikar Rafik, isas dan semua teman-teman Manajemen 2006 yang telah bersama-sama dalam menuntut ilmu di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
10. Buat teman-teman ku Resi Asmia Spd, Ilaryati Athien Cahyadi.SE, Yeni juwita.SE, Endang Dwi Nengsi SE, Erda.Spd, Elsi Andora.SE, Tri wahyuni.SE, Sri Suwarsini.SE, Riski, Sandri, dan lainnya yang telah memberikan dukungan dan semangat kepada penulis.
11. Buat anak-anak kos putri ayu ( Wiwit,Tiska, Nely, Lesty, yani, Dian, Sri dan yang lainnya yang telah memberikan dukungan dan semangat kepada penulis.

Akhir kata penulis mengucapkan semoga Allah melimpahkan rahmat dan hidayanya kepada kita semua dan skripsi ini bermanfaat bagi pembaca.

**Wasslamu'alaikum Wr.Wb**

Pekanbaru, 25 Mei 2011

Penulis

Gusti Ningsih  
10671004726

## **DAFTAR ISI**

	<b>Halaman</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>ix</b>
 <b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Perumusan Masalah.....	7
1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
1.4. Sistematika Penulisan.....	8
 <b>BAB II TELAAH PUSTAKA</b>	
2.1. Pengertian Manajemen Perkerditan.....	10
2.2.. Pengertian dan Unsur-unsur kredit.....	11
2.3. Pendekatan Dalam Perencanaan Kredit.....	14
2.4. Analisis Pemberian kredit.....	16
2.5. Prosedur dan Persyaratan Kredit.....	19
2.6. Pengawasan kredit.....	20
2.7. Prinsip-Prinsip Pengawasan Kredit.....	21
2.8. Kredit bermasalah.....	22
2.9. Faktor Penyebab Kredit Bermasalah.....	23

2.10. Teknik Penyelesaian Kredit Macet.....	27
2.11. Prilaku Konsumen.....	30
2.12. Faktor-Faktor Mempengaruhi Prilaku konsumen.....	32
2.13. Penelitian Terdahulu.....	38
2.14. Hipotesis.....	40
2.15. Variabel Penelitian.....	41

### **BAB III METODE PENELITIAN**

3.1. Lokasi penelitian.....	42
3.2. Jenis dan sumber Data.....	42
3.3. Populasi dan Sampel.....	43
3.4. Metode Pengumpulan Data.....	43
3.5. Validitas dan Reabilitas.....	44
3.6. Analisis Data.....	45

### **BAB IV GAMBARAN UMUM PROGRAM PENGEMBANGAN KECEMATAN (PPK)**

4.1. Sejarah Program Pengembangan Kecamatan.....	49
4.2. Struktur Organisasi.....	50
4.3. Tujuan PPK.....	50
4.4. Sasaran kelompok dan Lokasi PPK.....	51
4.5. Pendekatan dan Prinsip-Prinsip PPK.....	52
4.6. Cara Kerja PPK.....	57
4.7. Tugas dan Tanggung Jawab Pelaku PPK.....	60

## **BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

5.1. Hasil Penelitian.....	72
5.2. Deskripsi Variabel.....	74
5.3. Upaya Pihak Pelaksan PPK Dalam Mengatasi Kredit Macet.....	86
5.4. Uji Validitas dan Reabilitas.....	88
5.5. Pembahasan Regresi Linier Berganda.....	91
5.6. Uji F (F test).....	93
5.7. Uji T (T test).....	94

## **BAB VI KESEIMPULAN DAN SARAN**

6.1. Kesimpulan.....	96
6.2. Saran.....	97

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **I.1.Latar Belakang Masalah**

Kemiskinan pada dasarnya merupakan salah satu bentuk problema sosial yang muncul dalam kehidupan masyarakat, khususnya masyarakat di negara yang sedang berkembang. Masalah kemiskinan ini dikatakan sebagai suatu problema, karena masalah kemiskinan menuntut adanya suatu pemecahan masalah secara berencana, terintegrasi dan menyeluruh. (H.M.Arifin Noor, 2000:288 )

Dalam upaya peningkatan kemakmuran rakyat pedesaan kita diperlukan adanya pembangunan ekonomi yang memadai yaitu dengan menyalurkan dana bantuan, dan menciptakan lapangan pekerjaan

PPK adalah merupakan bagian utama dari upaya jangka menengah dan jangka panjang pemerintah dalam mengurangi kemiskinan masyarakat pedesaan dan juga memperbaiki kinerja pemerintah daerah. Selain itu, untuk membentuk pemerintah lokal yang demokratis dan partisipatif dengan memberdayakan masyarakat dalam menentukan pembangunan mereka sendiri. (National Management Consultant dan Sekretariat Nasional PPK,2000:6).

PPK bertujuan untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan masyarakat pedesaan secara nasional melalui pemberian modal usaha untuk mengembangkan kegiatan usaha produktif dan pembangunan prasarana dan sarana yang mendukung kegiatan sosial-ekonomi pedesaan.

Adapun sasaran yang ingin dicapai dari PPK adalah: (Tim Koordinasi PPK pusat,2002:3).

1) Sasaran Bidang Ekonomi

- Tumbuhnya usaha-usaha ekonomi yang produktif di pedesaan, seperti industri kecil, Perdagangan, usaha peternakan, usaha perikanan dan pertanian.
- Terbagunnya sarana dan prasarana ekonomi, seperti irigasi, jalan, pasar,dan sejenisnya.
- Terbagunnya lembaga keuangan yang dimiliki masyarakat di kecamatan untuk mendukung ekonomi.

2) Sasaran Bidang kelembagaan Manajemen pembangunan

- Tersusunnya rencana pembangunan tahunan.
- Adanya keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan dan pemanfaatan dana pembaguna.
- Adanya kontrol masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan masyarakat desa.
- Berperannya masyarakat dalam menentukan jenis kegiatan pembangunan, pelaksanaan kegiatan pembangunan serta pemantauan pelaksanaan pembangunan di desanya.

3) Sasaran Bidang Pengembangan Kemampuan Birokrasi pembangunan

- Meningkatkan kemampuan lembaga masyarakat (LKMD) dalam menyusun perencanaan pembangunan desa.
- Meningkatkan kemampuan aparat desa dalam mengelola pelaksanaan pembangunan dan proses penyusunan rencana desa, dan aparat kecamatan dalam memfasilitasi dan mengelola pelaksanaan pembangunan di tingkat kecamatan, masyarakat dalam mengelola pembangunan desanya.

PPK memberikan dana bantuan berupa **dana pinjaman** bergulir yang dikelola oleh masyarakat melalui wadah LKMD ( lembaga ketahanan masyarakat desa ) dan harus dikembalikan dengan serta tambahan bunga dana kepada UPK (Unit pengelola keuangan ). Penetapan bunga dana tersebut adalah sesuai dengan bunga pasar ( Minimal 20% ). Hal ini merupakan kesepakatan Bank Dunia dengan pemerintah Indonesia, sedangkan, **dana hibah** adalah dana yang digunakan untuk pembangunan prasarana dan sarana tidak perlu dikembalikan kepada UPK. Namun demikian, masyarakat yang bersangkutan harus menunjukkan kesanggupan untuk bertanggung jawab memelihara dan mengembangkan lebih lanjut ( Operation and maintenance ). ( tim koordinasi PPK pusat, 2001:21 ).

Sumber dana PPK berasal dari pemerintah ( Rupiah Murni APBN, Pinjaman Luar Negeri APBD ) dan masyarakat ( Swasta dan swadaya masyarakat ).

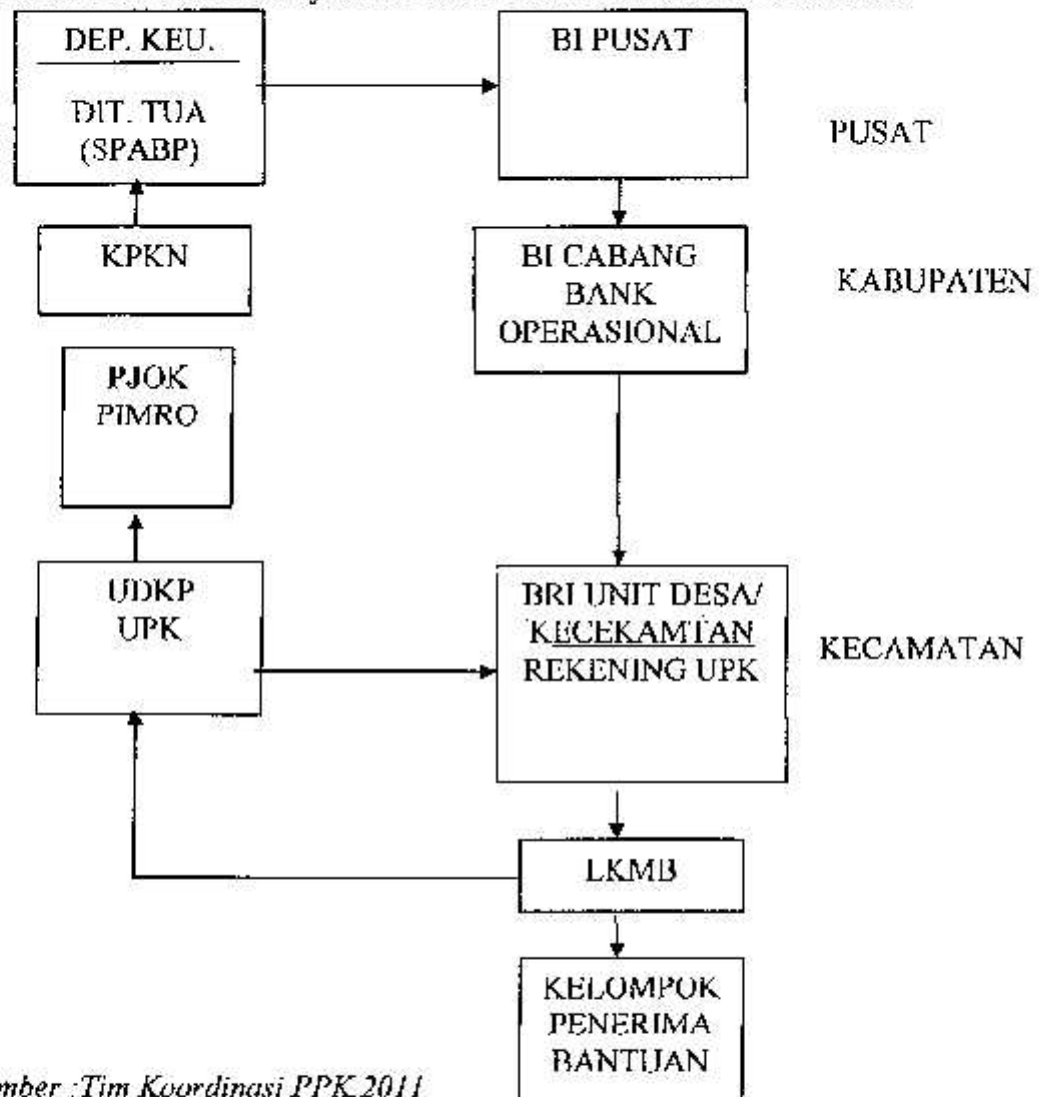
Penyaluran dan pencairan dana bantuan PPK pengaturanya dilakukan sebagai berikut: ( Tim Koordinasi PPK, tingkat pusat. 2000:16 ).

- a. Dana bantuan PPK adalah bantuan kepada masyarakat miskin yang bertempat tinggal di kecamatan sasaran.
- b. Penerimaan bantuan adalah LKMD dengan penanggung jawab ketua I LKMD. dana bantuan PPK di salurkan kepada LKMD melalui rekening kolektif bantuan yang di kelola bersama dengan UPK.
- c. Penyaluran dana dilakukan melalui KPKN (Kantor Perbendaharaan dan kas negara) dengan cara memindahkan ( Transfer ) dari rekening kas negara ke rekening UPK ( rekening kolektif LKMD ) pada BRI cabang /unit yang ditunjuk. Untuk itu, UPK diwajibkan membuka rekening dengan nama

- rekening bantuan PPK pada BRI cabang /unit terdekat dan memberitahukan nomor rekening kepada PjOk (Penanggung jawab Operasional Kegiatan) pimpro di kecamatan yang bersangkutan dan KPKN setempat.
- d. LKMD mengajukan permintaan penyediaan dana kepada UPK sesuai dengan jenis kegiatan dan jumlah dana yang disepakati dalam forum UDKP (Unit Daerah Kerja Pembangunan ) dan ditetapkan dalam surat penetapan camat dengan menyeraikan BAPPD (Berita Acara Pembayaran / Pengguna Dana).
  - e. UPK mengajukan permintaan pencairan dana kepada PjOK /pimpro dengan menyampaikan rekapitulasi pembayaran / pengguna Dana (RPPD) yang telah disetujui oleh FK (Fasilitator kecamatan) dan dilampiri dengan kuintansi dari UPK.
  - f. PjOK/pimpro bersama PjAK (Penanggung jawab Administrasi Keuangan)/ pempro mengajukan surat perintah pembayaran langsung (SPP-LS) kepada KPKN yang ditunjuk.
  - g. LKMD mencairkan dana di kantor cabang / unit BRI atas nama rekening bantuan PPK selanjutnya LKMD segera menyampaikan dana yang telah dicairkan tersebut kepada yang berhak menerimanya.

Adapun skema penyaluran dana bantuan PPK adalah sebagai berikut:

**Gambar I.1 : Skema Penyaluran dan Pencairan Dana Bantuan PPK**



Sumber : Tim Koordinasi PPK, 2011

Keterangan :

DIT.TUA	: Direktorat Tata Usaha Anggaran
DEP.KEU	: Departemen Keuangan
BI	: Bank Indonesia
KPMN	: Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara
BjOK	: Penanggung Jawab Operasional Kegiatan
UDKP	: Unit Daerah Kerja Pembangunan
UPK	: Unit Pengelola Keuangan
LKMD	: Lembaga Ketchanan Masyarakat Desa.
→	: Penyaluran Dana
→	: Pengajuan Pencairan Dana

Di Kecamatan Pangean Kabupaten Kuansing, terdapat sebuah desa yang bernama Tanah Bekali, penduduk yang berjumlah 7.369 orang yang terdiri dari 3.774 penduduk laki laki dan 3,595 penduduk perempuan, yang terdiri dari 8 RT, dengan luas wilaya 16 km dan berbatas dengan :

- a .Sebelah utara berbatas dengan desa pulau kumpai.
- b Sebelah barat berbatas dengan desa teluk pauh .
- c.Sebelah timur berbatas dengan pulau deras.

Penduduk Desa Tanah Bekali yang mayoritas suku melayu dan suku minang. Berbagai suku dan golongan yang terdapat di desa tanah bekali tidak menimbulkan kesenjangan konflik sosial dalam hidup bermasyarakat, namun mereka mampu hidup dengan damai dan serasi.

Program PPK masuk di Pangean tahun II (kedua) PPK yaitu tahu 2000 yang disambut baik oleh masyarakat setempat. Penyaluran dana di Kecamatan Pangean sesuai dengan kegiatan yang diusulkan oleh masyarakat Pangean mendapat alokasi dana sebesar Rp 227.000.000,-(dua ratus dua puluh tujuh juta ribu rupiah) untuk 5 kelompok di desa Tanah Bekali.

**Tabel 1.1 : Jumlah Peminjam, Besar Pinjaman, Pengembalian danTunggakan Pertahun**

N o	Tahun	Jumlah kelompok peminjam	Jumlah orang meminjam	Jumlah Pinjaman (Rp)	Jumlah Pengembalian (Rp)	Jumlah Tunggakan (Rp)
1	2005	2	6	9.500.000	9.500.000	-
2	2006	2	6	9.500.000	9.500.000	-
3	2007	4	8	59.500.000	59.000.000	-
4	2008	2	8	28.000.000	27.610.000	390.000
5	2009	7	10	120.000.000	99.792.900	20.207.100
		Jumlah	38	227.000.000	205.402.900	20.597.000

Sumber : Kantor UPK Pangean Tahun 2005s/d 2009

Sesuai dengan hasil forum UDKP ( Unit Daerah Kerja Pembangunan ), bagi desa yang mengembalikan sebelum jatuh tempo mendapat nilai A, membayar pada tanggal jatuh tempo mendapat nilai B, membayar setelah lewat tanggal jatuh tempo dan masih dalam bulan yang sama mendapat nilai C, dan kalau dibayar setelah lewat tanggal jatuh tempo pada bulan berikutnya mendapat nilai D, dan tidak berhak mendapat dana perguliran .

Kecamatan Pangean pada kelompok tani desa Tanah Bekali mengalami kredit macet (membayar tidak tepat waktu ) yaitu sebesar Rp 20,597.000 (dua puluh juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah ), sehingga tidak mendapat alokasi dana perguliran.

## **1.2. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

- a. Apakah faktor yang mempengaruhi kredit macet program pengembangan kecamatan?
- b. Bagaimanakah pengaruh perilaku kelompok tani terhadap program pengembangan kecamatan di desa tanah bekali?
- c. Apakah pengaruh perilaku terhadap kredit macet?

## **1.3. Tujuan dan Manfaat penelitian**

1.3.1. Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk menganalisis faktor yang mempengaruhi kredit macet program pengembangan kecamatan.

- b. Untuk menganalisis perilaku kelompok tani dalam program pengembangan kecamatan di desa tanah bekali.
- c. Untuk mengetahui pengaruh perilaku terhadap kredit macet.

## 2. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang penulis lakukan ini adalah sebagai bahan pertimbangan bagi kelompok tani dalam menggunakan dana PPK. Di samping itu, juga untuk menambah pengetahuan dan wawasan penulis tentang PPK.

### 1.4. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pemahaman dan pengambilan pengertian dalam tulisan ini, maka penulis merencanakan penulisan akan dibagi dalam 6 bab yang kemudian dibagi menjadi beberapa sub bagian yaitu :

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian dan sistematika penulisan .

#### **BAB II : TELAAH PUSTAKA**

Berisi pengertian manajemen perkreditan, pengertian kredit dan unsur kredit, pendekatan dalam perencanaan kredit, analisis kredit, prosedur dan persyaratan kredit, pengawasan kredit prosedur pemberian kredit dana bantuan PPK, pengertian perilaku konsumen, faktor-faktor perilaku konsumen, hipotesis dan variabel penelitian.



**BAB III : METODE PENELITIAN**

Berisi lokasi penelitian, populasi dan sampel, sumber data metode pengumpulan data dan metode pembahasan .

**BAB IV : TINJAUAN UMUM TENTANG KONSEP PPK**

Berisi sejarah PPK tujuan PPK, kelompok sasaran dan lokasi PPK, pendanaan dan prinsip-prinsip PPK, cara kerja PPK serta tugas dan tanggung jawab PPK.

**BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Berisi penyebab kredit macet dan upaya pihak PPK dalam mengatasi kredit macet.

**BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini merupakan penutup yang mengemukakan beberapa kesimpulan dari pembahasan terhadap penelitian yang diteliti. Sebagai tindak lanjut dari kesimpulan, penulis kemukakan beberapa saran sebagai pertimbangan.

## **BAB II**

### **TELAAH PUSTAKA**

#### **2.1. Pengertian Manajemen Perkereditan**

Banyak ahli yang memberikan definisi tentang manajemen, diantaranya manajemen adalah proses perencanaan, mengorganisir, mengarahkan dan mengendalikan kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi dengan menggunakan sumber daya organisasi .(Hanafi, 2002:6)

Sedangkan menurut G.R Terry Manajemen adalah proses yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian yang masing-masing bidang tersebut digunakan baik ilmu pengetahuan maupun keahlian yang diikuti secara berurutan dalam rangka mencapai sasaran yang telah semula.(Anoraga, 2000:109)

Manajemen adalah pencapaian tujuan organisasi dengan cara yang efektif dan efisien melalui perencanaan, pengarahan dan pengendalian sumber daya organisasi. ( Draft,2002:6 ) pada dasarnya kunci keberhasilan manajemen kredit adalah bagaimana kredit tersebut dapat mengambil hati masyarakat, dalam hal ini sebagai *financial intermediary* yaitu sebagai perantara keuangan masyarakat yaitu perantara dari mereka yang kelebihan uang dan mereka yang kekurangan uang .

Berbicara manajemen perkereditan tidak lepas kaitannya dengan manajemen pemasaran sebagai konsep umum dan manajemen penjualan sebagai konsep khusus karena jasa USP sebagai lembaga keuangan, khususnya perkereditan adalah salah satu bentuk produk jasa yang dijual pada konsumen sehubungan dengan

salah satu tujuan pendirian lembaga keuangan untuk memperoleh laba yang optimal.

Menurut Sinungan (2002:210) menjelaskan definisi manajemen perkreditan adalah manajemen perkreditan pada dasarnya merupakan proses yang terintegrasi antara sumber-sumber dana kredit, alokasi dana yang dapat dijadikan kredit dengan perencanaan, pengorganisasian, pemberian administrasi dan pengamatan kredit.

## **2.2 Pengertian dan Unsur- unsur kredit**

Istilah kredit, berasal dari perkataan latin *credo*, yang berarti *I Believe, I trust*, saya percaya atau saya menaruh kepercayaan. kepercayaan dilihat sebagai suatu unsur yang harus di pegang sebagai benang merah melintas falsafah perkreditan dalam arti sebenarnya, bagaimana bentuk, macam dan ragamnya dan dari manapun asalnya serta kepada siapapun diberikan.

Dalam pemberian kredit adapun pihak yang saling berkepentingan yaitu si pemberi kredit dan si penerima kredit. dimana pemberian kredit terjadi apabila seseorang menyerahkan uang, barang atau pemberian jasa kepada orang lain dan balas jasa diadakan di kemudian hari.

Undang-Undang perbankan nomor 10 tahun 1998 mengartikan kredit sebagai penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Pengertian kredit Menurut Rivai Andrian (2005:4) adalah sebagai berikut:

Kredit adalah penyerahan barang, jasa atau uang dari satu pihak ( kreditur/ pemberian pinjaman ) atas dasar kepercayaan kepada pihak lain ( nasabah/ borrower ) dengan janji membayar dari penerima kredit kepada pemberian kredit pada tanggal yang telah disepakati kedua belah pihak .

Dengan demikian, dalam prakteknya kredit adalah :

- 1) Penyerahan nilai ekonomi sekarang atas dasar kepercayaan dengan harapan mendapatkan kembali suatu nilai ekonomi yang sama dikemudian hari .
- 2) Suatu tindakan atas dasar perjanjian dimana dalam perjanjian tersebut terdapat jasa dan balas jasa yang keduanya dipisahkan oleh unsur waktu .
- 3) Suatu hak, yang dengan haknya tersebut dengan seseorang dapat mempergunakannya untuk tujuan tertentu, dalam batas waktu tertentu dan atas pertimbangan tertentu pula.

Dari definisi di atas terdapat unsur-unsur yang harus diperhatikan oleh bank dan lembaga keuangan dalam memberikan kredit meliputi:(Kasmir,2001:94)

#### 1. Kepercayaan

Unsur ini adalah merupakan unsur yang paling penting dalam perkreditan. Yaitu suatu keyakinan pemberian kredit bahwa kredit yang diberikan ( berupa barang, uang atau jasa ) akan benar-benar diterima kembali dimasa yang akan datang. Kepercayaan ini diberikan dimana sebelumnya sudah dilakukan penelitian dan penyelidikan tentang kondisi masa lalu dan sekarang terhadap nasabah pemohon kredit.

#### 2. Kesepakatan

Disamping unsur percaya di dalam kredit juga mengandung unsur kesepakatan antara si pemberi kredit dan si penerima kredit. kesepakatan ini dituangkan

dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajiban masing-masing.

### 3. Jangka Waktu

Setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati. Jangka waktu tersebut dapat berbentuk jangka pendek, jangka menengah.

### 4. Resiko

Adanya suatu tenggang waktu pengembalian akan menyebabkan suatu resiko tidak tertagihnya pemberian kredit. Suatu panjang suatu kredit semakin besar risikonya demikian pula sebaliknya.

### 5. Balas jasa

Merupakan keuntungan atas pemberian suatu kredit atau jasa tersebut yang kita kenal nama bunga. Balas jasa dalam bentuk bunga dan biaya administrasi kredit ini merupakan keuntungan bank. Sedangkan bagi bank dengan prinsip syariah balas jasanya ditentukan dengan bagi hasil.

Disamping hal tersebut diatas, kredit sangat di perlukan setiap kegiatan masyarakat. adakalanya para ahli mengatakan tidak satupun usaha di dunia yang bebas dari adanya kredit. Jadi kredit merupakan suatu faktor yang sangat dominan dalam membantu kelancaran usaha perdagangan, keuangan dan sebagainya.

Fungsi kredit dalam kegiatan perekonomian dapat di lihat sebagai berikut:

1. kredit dapat meningkatkan *utiliti* ( daya guna ) dari modal atau uang .
2. kredit dapat meningkatkan *utiliti* (daya guna ) suatu barang.
3. kredit dapat meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang.
4. kredit menimbulkan kegairahan berusaha masyarakat.

5. kredit sebagai alat stabilitas ekonomi.
6. kredit sebagai jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional.
7. kredit sebagai alat hubungan ekonomi internasional.(Rivai dan andrian, 2005:8).

### 2.3. Pendekatan Dalam Perencanaan Kredit

Banyak hal yang harus dipertimbangkan dalam menyusun perencanaan kredit agar penyaluran kredit dapat berjalan dengan baik dan tercapai sesuai dengan yang direncanakan, yaitu sebagai berikut (Rivai dan Andrian,2005:115):

#### 1. Perencanaan Berdasarkan Pendekatan Sumber Dana

Kemampuan dalam menjual kreditnya kepada masyarakat tergantung dari sumber dana yang dapat yang dikuasainya.

- a. Berapa volume dana yang dapat dikumpulkan?
- b. Berapa volume dana yang dapat dipinjamkan?
- c. Bagaimana jenis-jenis biaya yang tersedia?
- d. Dari mana sumber-sumber dana tersebut?
- e. Berapa *cost of* atau *cost many*?
- f. Berapa *margin /spread* yang akan dapat diperoleh?

#### 2. Perencanaan Berdasarkan Pasar

Pendekatan pasar ini lazim juga disebut dengan "*costumero oriented*" aritnya, penyaluran kredit didasarkan kepada kebutuhan nasabah atau dengan kata lain, kepada siapa dana tersebut akan dipasarkan faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan adalah sebagai berikut:

- a. Perlu memahami *market profile* ditinjau dari "*ekonomik environment*."
- b. Perlu mengetahui *comvetitive profile* dan berapa *market share* yang berhasil diraih
- c. Perlu mengetahui *costumer profil*
- d. Perlu mengetahui *produk profile* yang sedang dan yang akan dipasarkan oleh bank.

### 3. Perencanaan Kredit Dengan Pendekatan Anggaran

Dalam pendekatan anggaran ini pola berpikir yang dipakai sesuai dengan pengertian anggaran itu sendiri, yaitu sesuai rencana kerja yang memanifestasikan dalam bentuk kesatuan mata uang.

### 4. Perencanaan perkreditan berdasarkan pendekatan peraturan-peraturan moneter yang ada.

Beberapa model ketentuan moneter di bidang perkreditan yang dapat terjadi dengan cara-cara pemanfaatannya dapat diberikan ilustrasi sebagai berikut:

- a. Pemberian kredit ke sektor-sektor ekonomi yang diprioritaskan akan dapat memberikan manfaat bagi bank komersil karena adanya kredit likuiditas dari bank sentral dengan suku bunga rendah dan adanya bantuan share dari dana pemerintah.
- b. Dalam rangka pembentukan modal tetap domestik, akan tampak dalam pemberian kredit investasi dengan suku bunga rendah.
- c. Dalam rangka perbaikan neraca pembayaran manifestasinya dengan mendorong ekspor melalui kredit produksi barang ekspor atau produksi substitusi barang impor dengan suku bunga kredit rendah.
- d. Dalam rangka perluasan kesempatan kerja dan perbaikan distribusi pendapatan, pemberian kredit diarahkan kepada perusahaan-perusahaan yang padat karya.
- e. Dalam rangka pengembangan usaha golongan ekonomi lemah, arah pemberian kredit ditujukan kepada pengusaha kecil.

- f. Dalam rangka peningkatan kesempatan dalam memperoleh keahlian dan pengetahuan, arah pemberian kredit pada usaha-usaha di bidang pendidikan ataupun pemberian kredit kepada mahasiswa.
- g. Dalam rangka efisiensi pemakaian dana, arah pemberian kredit harus dihindari pada proyek-proyek yang sudah jenuh.

#### **2.4. Analisis Pemberian Kredit**

Analisis kredit diberikan untuk meyakinkan bank bahwa si nasabah benar-benar dipercaya, maka sebelum kredit di berikan bank terlebih dahulu mengadakan analisis kredit. Analisis kredit mencakup:

- a. Latar belakang nasabah atau perusahaan .
- b. Prospek usahanya .
- c. Jaminan yang diberikan serta faktor-faktor lainnya.

Tujuan utama analisis ini adalah untuk menentukan kesanggupan dan kesanggupan seorang peminjam untuk membayar kembali pinjaman sesuai dengan persyaratan yang terdapat dalam perjanjian. selain itu, untuk menentukan syarat pemberian kredit. (Edwan W.R, 2001:184).

Jika kredit yang disalurkan mengalami kemacetan, maka langkah yang di ambil oleh bank adalah berupaya menyelamatkan kredit tersebut dengan berbagai cara tergantung dari kondisi nasabah atau penyebab kredit tersebut macet. Jika memang masih bisa dibantu, maka bank bertindak membantu nasabah apakah menambah jumlah kredit atau memperpanjang jangka waktunya. Namun jika memang sudah tidak dapat di selamatkan kembali, maka tindakan bank terakhir menyita jaminan yang telah dijamin oleh nasabahnya.



Prinsip dasar dalam pemberian kredit ( *basic faktor* ) (Simorangkir, 2002:97)

1. *Character* ( Watak )

Yaitu tabiat kemampuan si pemohon untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya. Yang perlu diteliti adalah sifat-sifat, kebiasaan, kepribadian, cara hidup, keadaan keluarga dan kehidupan sebagai anggota masyarakat dan lingkungannya.

2. *Capability* (Kemampuan)

Yaitu kemampuan nasabah dalam bidang bisnis yang dihubungkan dengan pendidikannya. kemampuan bisnis juga diukur dengan kemampuannya dalam memahami tentang ketentuan- ketentuan pemerintah. begitu pula dengan kemampuan mengelolah usahanya serta kemampuannya mencari laba, pada akhirnya akan terlihat "kemampuannya" dalam mengembalikan kredit yang disalurkan. faktor kepemimpinan juga bisa mempengaruhi maju mundurnya suatu usaha/bisnis yang dilaksanakan oleh nasabah, karena dalam menjalankan usaha/bisnis sangat memerlukan manajemen atau pengelola agar tujuan dapat tercapai. Orang melaksanakan fungsi manajemen disebut dengan mencejer. Seorang mencejer tidak jauh beda dengan seorang pemimpin. Memimpin orang merupakan bagian yang penting dalam setiap usaha. ekonomi yang mempengaruhi suatu negara dan membawa terhadap perusahaan yang mencriama peraturan-peraturan moneter, perpajakan anggaran belanja dan lain-lain.

### 3. *Capital* ( Modal )

Penyelidikan atas modal tidak hanya ditinjau dari segi besar kecilnya modal yang ditanam, tetapi bagaimana penyebaran pembagian di dalam alat produksi. Distribusi modal tersebut ditempatkan oleh pemohon kredit dilihat dari pengaturan modal untuk kegiatan usahanya, modal kerja yang ditanamkan untuk kegiatan tersebut agar berjalan secara efektif.

### 4. *Collateral* ( Jaminan )

Yaitu barang-barang jaminan yang diserahkan oleh si pemohon kredit atas kredit yang diterimanya. Jaminan disini digunakan sebagai alat penjamin apabila usaha yang dibiayai oleh kreditur itu gagal atau sebab-sebab lain dimana si pemohon kredit tidak mampu melunasi kredit dari usaha yang dijalankannya. Selain itu jaminan tersebut harus memadai bukan saja dilihat dari sudut finansialnya saja melainkan juga nilai hukumnya.

### 5. *Condition* ( Keadaan Perekonomian )

Kondisi dilihat dari situasi perekonomian secara umum dan kondisi pada sektor usaha si pemohon kredit. Di lihat dari keadaan yang dapat mempengaruhi dari kelancaran usaha dari perusahaan yang memperoleh kredit. Maksud dari penilaian terhadap kondisi ini agar dapat memperkecil resiko yang mungkin timbul dari kondisi ekonomi yang mempengaruhi suatu negara dan membawa dampak terhadap perusahaan yang menerima kredit tersebut. Kondisi ini meliputi kebijakan pemerintah, peraturan-peraturan moneter, perpajakan anggaran belanja dan lain-lain.

## 6. *Constrain*

Yaitu batasan-batasan atau hambatan-hambatan yang tidak memungkinkan seseorang melakukan bisnis di suatu tempat. Masalah *cosntrain* sangat sukar dirumuskan, karena tidak dinyatakan dalam pernyataan tertulis dan masalahnya tidak selalu diidentifikasi secara fisik permasalahannya. Pertimbangan ini banyak menyangkut masalah moral.

### **2.5. Prosedur dan Persyaratan Kredit**

Prosedur pembiayaan adalah suatu gambaran sifat atau metode untuk melaksanakan pembiayaan (Zainul, 2002:238)

Dalam pemberian kredit kepada nasabah, harus berdasarkan penilaian yang tepat dan pada waktu penyelesaian pengambilan kredit tidak terjadi hal-hal yang mendatangkan kerugian kepada pihak yang memberi kredit. Yang perlu diperhatikan adalah kemungkinan tidak terbayar kredit yang diberikan. Pemberian kredit mengandung suatu tingkat resiko tertentu, untuk menghindari resiko yang mungkin terjadi maka permohonan kredit harus dinilai sesuai dengan dasar prosedur dan persyaratan pemberian kredit. Pendekatan karakter merupakan pendekatan terpenting menilai kelayakan pengajuan calon nasabah. Apabila penilaian layak maka akan dilakukan pendekatan *saving power* untuk menentukan pelaporan yang diberikan. (Widyaningrum, 2002:69).

Dalam menetapkan sistem-sistem yang menjadi keunggulan perlu adanya promosi sehingga dapat menarik konsumen, ini dapat dilakukan sehingga nasabah menjadi tertarik. Dalam perkreditan, perlu juga menerapkan strategi promosi yang dapat dilakukan antara lain dengan prosedur dan persyaratan yang fleksibel

sehingga bisa bersaing. Orientasi pelayanan pada nasabah mencerminkan keunggulan bersaing. adanya pelayanan yang diberikan kepercayaan dimana pelayanan tersebut mengutamakan kepentingan nasabah sehingga meningkatkan kepercayaan nasabah.

## 2.6. Pengawasan Kredit

Komponen utama yang menjadi faktor penentu kesehatan suatu lembaga keuangan adalah permodalan, kualitas aktiva produktif, manajemen, rentabilitas dan likuiditas .(Tjockam:2000:218 ).

Pengawasan kredit menurut Rivai dan andrian, (2005:565) adalah sebagai berikut:

Yaitu usaha untuk mengendalikan pelaksanaan kredit oleh bank dan nasabah agar persyaratan dan target yang diasumsikan dapat dipenuhi sebagai dasar persetujuan kredit ( *term of leanding* ).

Pengawasan ini sendiri merupakan salah satu fungsi pokok dari manajemen ( *planing skill, organisising skill, dan controlling skill* ) *plening* melihat kedepan, *organising* menyatukan semua potensi, *actuanting* melaksanakan yang direncanakan, *controlling* membuktikan kesesuaian, sehingga menghasilkan tujuan yang disepakati bersama.

Jadi pengawasan kredit harus mendapat perhatian sungguh-sungguh sehingga pengawasan tersebut menghasilkan hal-hal sabagai berikut: (Tjockam 2000:219).

- a. kegiatan pengawasan kredit ini hanya memberikan umpan balik secara dini atas kemungkinan deviasi yang terjadi akibat sebab-sebab intern dan sebab-sebab ekstern.

- b. Manajemen berpeluang melakukan antisipasi variabel penyebab deviasi, baik dari variabel intern maupun ekstern, yang berasal analisis SWOT.
- c. Untuk dapat menyusun lanjutan kegiatan pengawasan dimaksud, dan dapat menyusun strategi tindakan lanjut untuk memperbaiki kondisi kredit yang kurang baik, sehingga deviasi yang terjadi tidak sempat terakumulir.
- d. Sehingga dapat menentukan status kolektibilitas kredit agar strategi perbaikan dapat difokuskan pada penyebab utama deviasi dari setiap tingkat kolektibilitas kredit .
- e. Dapat mendeteksi ketaatan dan kepatuhan kepada perjanjian dan peraturan yang berlaku (terjadi atau tidaknya pelanggaran bersifat minor atau mayor).

## 2.7. Prinsip-prinsip Pengawasan kredit

Pengawasan kredit adalah usaha untuk mengetahui dan menyusun strategi perbaikan secara dini indikasi-indikasi penyimpangan (daviation) dari kesepakatan. Oleh sebab itu perlu dilakukannya pengawasan kredit secara menyeluruh dengan menggunakan beberapa pendekatan dengan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Upaya pencegahan dan penjagaan dini ( *earli warning* ) upaya ini dilakukan terhadap risk asset dari indikas-indikasi (signals) penyimpangan yang dapat merugikan dan gagalnya usaha debitur.

*b. Built control*

prinsip tersebut juga disebut dengan pengawasan sehari-hari oleh pejabat terkait dalam perkreditan sesuai dengan sistem dan prosedur yang dipakai dalam kegiatan tersebut.

*c. Pengawasan kredit*

pengawasan kredit ini merupakan bagian dari kontrol internal yang meliputi aspek perkreditan dan pelaksanaannya berkaitan dengan satuan kerja audit intern.

## **2.8. Kredit Bermasalah**

Kredit bermasalah terdiri dari (Widodo,2000:144 )

*a. Kredit Kurang Lancar*

Terdapat tunggakan asuransi pokok sebagai berikut:

Tunggakan melampaui 1 (satu) bulan dan belum melampaui 2 (dua) bulan.

*b. Kredit Diragukan*

Penyaluran dana digolongkan diragukan apabila penyaluran dana yang bersangkutan tidak memenuhi kriteria kurang lancar, tetapi berdasarkan penilaian dapat disimpulkan.

*c. Dana yang disalurkan masi dapat diselamatkan dan angunan yang bernilai sekurang –kurangnya 75% dari utang peminjam.*

*d. Dana yang disalurkan tidak dapat diselamatkan, tetapi anggunanya masi bernilai sekurang-kurangnya100 % dari utang peminjam.*

c. Kredit Macet

Kredit digolongkan ke dalam kredit macet apabila memenuhi kriteria diantaranya:

- a. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan bunga yang telah melampaui 270 hari.
- b. Kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru.
- c. Dari segi hukum maupun kondisi pasar, jaminan tidak dicairkan pada nilai yang wajar.

## **2.9. Faktor Penyebab Kredit Bermasalah**

Banyak faktor penyebab terjadinya kredit bermasalah, yaitu:  
(Mahmoeddin, 2002:51)

1. Faktor Internal Perbankan Faktor internal perbankan yang menyebabkan kredit bermasalah, ialah adanya kelemahan atau kesalahan dalam bank itu sendiri.seperti:

- a. Kelemahan dalam analisis kredit

Setiap analisis kredit harus berdasarkan data yang benar-benar akurat, agar hasil analisis menjadi tepat.

- b. Kelemahan dalam dokumen kredit

Salah satu kekuatan bank dalam menghadapi kenakalan nasabahnya, adalah kekuatan dan kelengkapan dokumen yang bisa digunakan sebagai senjata bank.

c. Kelemahan dalam supervisi kredit

Setiap usaha tentu ada resiko non bisnis. Karena itu bank harus tahu persis setiap perkembangan usaha nasabanya. Satu-satunya cara dalam dengan melakukan pengawasan dan pemantauan, baik secara periodik maupun secara insidental dan secara kontinyu, agar setiap masalah dapat ditanggulangi secara dini.

d. Kelemahan kebijaksanaan kredit

Setiap bank mempunyai kebijaksanaan kredit yang sudah digariskan terlebih dahulu seperti masalah sistem, prosedur dan wewenang yang diberikan kepada para pejabat bank. Kebijaksanaan kredit ini bisa saja mengandung kelemahan yang mengakibatkan pelaksanaan juga menimbulkan banyak kelemahan.

e. Kelemahan bidang agunan

Mungkin secara hukum setiap agunan telah diikat dengan baik dan kuat. Namun harus diingat bahwa barang jaminan tersebut secara fisik ada yang berpinda tangan atau rawan kerusakan. Sehingga petugas pemeriksaan hendaknya melakukan pemantauan dan pengawasan secara rutin dan insidental terhadap barang jaminan.

f. Kelemahan sumber daya manusia

Sebagaimana tenaga untuk kredit recovery maka tenaga penyelamatan dan penyelesaian bukanlah pekerjaan yang mudah seperti melakukan analisis kredit biasa, diperlukan tenaga ahli di bidang penyelamatan dan penyelesaian kredit.



g. Kelemahan teknologi

Ketidakmampuan bank secara teknis dapat dalam berbagai bentuk, antara lain keterbatasan peralatan, keterbatasan secara kuantitatif, keterbatasan kemampuan petugas secara kualitatif serta terbatasnya sarana dan prasarana yang berkaitan dengan pekerjaan teknis seperti komputer dan software.

2. Faktor Internal Nasabah

Faktor internal nasabah yang menyebabkan kredit bermasalah antara lain:

- a. kelemahan karakter nasabah .
- b. Kelemahan kemampuan nasabah.
- c. Musibah yang dialami oleh nasabah.
- d. Kecerobohan nasabah.
- e. Kelemahan manajemen.

3. Faktor Eksternal

Faktor eksternal adalah faktor-faktor yang berada diluar kekuasaan manajemen seperti:

- a. Situasi ekonomi yang negatif.
- b. Situasi politik dalam negeri yang merugikan.
- c. Politik negara lain yang merugikan.
- d. Situasi alam yang merugikan.
- e. Peraturan pemerintah yang merugikan.

#### 4. Faktor Kegagalan Bisnis

Dalam analisis permohonan kredit, petugas kredit melakukan identifikasi resiko yang mungkin timbul. Analisis kredit didasarkan pada kecermatan atas kemampuan meminimalkan resiko, namun harus disadari bahwa resiko tersebut tidak mungkin hilang 100 %. Kegagalan bisnis senantiasa muncul diluar kemampuan berbagai pihak.

- a. Aspek hubungan (*human relation*)
- b. Aspek yuridis.
- c. Aspek manajemen.
- d. Aspek manajemen.
- e. Aspek teknis produksi.
- f. Aspek keuangan.
- g. Aspek sosial ekonomi.

#### 5. Faktor Ketidakmampuan Manajemen

Khusus aspek manajemen, maka berdasarkan penelitian Dun & Bradstreet terhadap perusahaan di Amerika serikat menyimpulkan bahwa lebih dari 90 % kegagalan bisnis bersumber dari ketidak mampuan manajemen atau *incompetence management* seperti:

- a. Pencatatan yang tidak memadai
- b. Informasi biaya tidak memadai
- c. Modal jangka panjang tidak cukup
- d. Gagal mengendalikan biaya
- e. Overheadcost yang berlebihan

- f. Kurangnya pengawasan
- g. Gagal melakukan penjualan
- h. Investasi berlebihan
- i. Kurang menguasai teknis
- j. Perselisihan antar pengurus.

## **2.10. Teknik Penyelesaian kredit Macet**

Dalam hal kredit macet pihak bank perlu melakukan penyelamatan, sehingga tidak ada akan menimbulkan kerugian. Penyelamatan terhadap kredit macet dilakukan dengan cara antara lain:

### **a. *Rescheduling***

Suatu tindakan yang diambil dengan cara memperpanjang jangka waktu kredit atau jangka waktu angsuran. Dalam hal ini debitur diberikan keringanan dalam masalah jangka waktu pembayaran kredit, misalnya perpanjangan jangka waktu kredit dari 6 bulan menjadi 1 tahun sehingga debitur mempunyai waktu yang lebih lama untuk mengembalikannya. Memperpanjang angsuran hampir sama dengan jangka waktu kredit, misalnya dari 36 kali angsuran menjadi 48 angsuran dan hal ini tentu saja jumlah angsuran pun menjadi mengecil seiring dengan penambahan jumlah angsuran.

### **b. *Reconditioning***

*Reconditioning* maksudnya adalah bank mengubah berbagai persyaratan yang ada seperti:

1. Kapitalisasi bunga, yaitu bunga dijadikan hutang pokok.

2. Penundaan pembayaran bunga sampai waktu tertentu.

3. Penurunan suku bunga .

4. Pembebasan bunga.

c. *Restructuring*

*Restructuring* merupakan tindakan bank kepada nasabah dengan cara menambah modal nasabah dengan pertimbangan nasabah memang membutuhkan tambahan dana dan usaha yang dibiayai memang masi layak.

d. Kombinasi

Merupakan kombinasi dari ketiga jenis diatas.

e. Penyitaan jaminan

Penyitaan jaminan merupakan jalan terakhir apabila nasabah benar-benar tidak mempunyai itikad baik ataupun suda tidak mampu lagi membayar semua hutang-hutangnya.

### **Tinjauan Dari Hukum Islam Tentang Jual Beli Secara Kredit**

Menurut etimologi atau bahasa, *taqsith* atau kredit adalah membagi-bagi sesuatu dan memisah-misahkannya menjadi beberapa bagian yang terpisah. Sedangkan menurut Terminologi atau istilah *bai'bit-taqsith* atau jual beli secara kredit adalah menjual sesuatu dengan pembayaran yang diangsur dengan cicilan tertentu dan lebih mahal dari pada pembayaran kontan.

Muhammad Aqlal ibrahim mengemukakan bahwa ada beberapa pedoman yang dapat dijadikan pegangan dalam memahami maksud jual beli secara kredit secara sya'i yaitu :

1. Seorang pedagang menjual barang dagangan secara kredit dengan ketentuan harga yang lebih tinggi dari pada secara tunai.
2. Taqsih atau kredit ialah membayar hutang dengan berangsur-angsur pada waktu yang telah ditentukan.
3. Pembayaran yang diangsur ialah sesuatu yang pembayaran dipersyaratkan diangsur dengan cicilan tertentu dan pada waktu tertentu.

Para ulama yang membolehkan *bai' bittaqsith* atau jual beli secara kredit ini menemukan banyak dalil yang diambil dari ayat-ayat Al-Qur'an, Sunnah dan Qiyas jual beli secara kredit merupakan usaha yang diperbolehkan dan dihalalkan oleh Allah SWT, dengan dasar hukum jual beli terdapat dalam firman Allah yakni dalam surat *al-baqarah* ayat 275 yang berbunyi :

وَأَحَلُّهُ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا (البقرة : 275)

Artinya : *Dan padahal Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...*

Pada ayat lainnya yaitu pada surat an-Nisaa' ayat 29 Allah menegaskan sebagai berikut

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ  
إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ (النساء : 29)

Artinya : " *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesama mu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu.*"

Mengenai jual beli yang telah ditegaskan dalam Al-Qua'an landasan hukum jual beli ini juga dijelaskan di dalam hadis Nabi SAW yang berbunyi :

عَنْ رِفَاعَةَ ابْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ. وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ رَوَاهُ الْبَرْقَاءُ وَحَسَنُ الْحَافِظُ.

Artinya : " Dari Rifui' : bahwa Nabi SAW ditanya : pencarian apakah yang paling baik ? Beliau menjawab : ialah orang yang bekerja dengan tangannya dan tiap jual beli yang bersih".( H.R.Bazzar dan disahkan oleh Hakim).

Begitu juga dilihat dari sudut Qiyas, jual beli secara kredit termasuk jual beli yang diayariatkan Allah SWT, sesuai dengan sabda Nabi yang berbunyi : ﷺ

مَنْ أَسْلَفَ فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ, وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ

Artinya : " Siapa saja yang meminjamkan ( sesuatu ) hendaknya ia meminjamkannya dalam takaran tertentu dan timbangan tertentu sampai batas waktu tertentu".( H.R. Bukhari dan Muslim ).

Dengan demikian berdasarkan dalil-dalil diatas dapat kita simpulkan bahwa jual beli secara kredit merupakan perbuatan yang disyari'atkan islam sebagai suatu upaya untuk membuat dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari dan adanya lapangan pekerjaan yang halal yang telah diatur dalam syari'at islam.

## 2.11. Prilaku Konsumen

Prilaku konsumen merupakan tindakan yang langsung terlibat dalam mendapatkan, mengkonsumsi dan menghabiskan produk dan jasa termasuk proses produksi yang mendahului dan menyusuli tindakan ini. Istilah prilaku hubungan dengan objek yang studynya diarahakan pada permasalahan manusia di bidang pemasaran, konsep prilaku konsumen secara terus menerus dikembangkan dengan berbagai pendekatan.

Untuk memahami konsumen dan mengembangkan strategi pemasaran yang tepat kita memahami apa yang mereka pikirkan dan mereka rasakan (pengaruh ) apa yang mereka lakukan ( prilaku ) apa serta dimana ( kejadian sekitar ) yang mempengaruhi serta di pengaruhi oleh apa yang dipikirkan, dirasa, dan dilakukan.

Prilaku konsumen adalah sebagai interaksi dinamis antara pengaruh dan kongnisi, prilaku dan kejadian dimana manusia melakukan aspek dan hidup mereka.(peter, olsen 2000:9)

Prilaku konsumen biasanya disebut juga dengan sikap yang pada dasarnya adalah penerimaan akan suatu hubungan antara diri sendiri dengan sesuatu diluar itu sendiri. Semakin kuat besar hubungan semakin besar hubungan tersebut semakin besar minat yang diinginkan. Sikap adalah evaluasi pemasaran emosioanal dan kecenderungan tindakan yang menguntungkan dan bertahan lama dari seseorang terhadap suatu objek atau gagasan.(kotler 2000:20)

Defenisi prilaku konsumen adalah prilaku yang memperlihatkan konsumen dalam mencari, membeli, menggunakan produk dan jasa yang mereka harapkan akan memuaskan kebutuhan mereka.(suwarnan: 2003:25)

Jadi biasa diartikan perilaku konsumen adalah proses pengambilan keputusan dan aktifitas dalam mengevaluasi, memperoleh barang dan jasa segala kegiatan tindakan, proses psikologis yang mendorong tindakan tersebut sebelum membeli produk /barang jasa.

Memahami perilaku konsumen dan mengenal pelanggan tidaklah sederhana, pelanggan mungkin saja mengatakan kebutuhan dan keinginan mereka. Tetapi mereka malah bertindak yang lebih dalam dan biasa saja mereka menanggapi pengaruh yang mengubah pola pikir mereka pada menit-menit terakhir. Bagaimana juga pemasaran harus mempelajari keinginan persepsi, preferensi, serta perilaku belanja dan pembelian pelanggan serta sasaran mereka.

## **2.12. Faktor faktor Mempengaruhi Perilaku Konsumen**

Secara sistematis keputusan konsumen merupakan ungkapan dari faktor-faktor mempengaruhi dan membentuk keputusan. Ada tiga kelompok pengaruh utama yang paling dipandang mempengaruhi perilaku konsumen, yaitu:(Risminiati, Suratno,2001:76)

### **1. Faktor individu**

Faktor yang unit untuk orang tertentu berbagai faktor individu dapat mempengaruhi keputusan membeli, pengaruh pembeli menggambarkan akibat dari pernyataan mengenai produk yang dibuat oleh seseorang terhadap dan kemungkinan pembelian lain . Faktor pribadi dibagi atas tiga bagian, yaitu :

#### **a. Faktor Demografi**

Ciri-ciri individual seperti jenis kelamin, usia, ras, budaya suku bangsa, pendapatan kehidupan keluarga dan pekerjaan.

#### **b. Faktor Situasional**

Kedudukan eksternal yang ada ketika konsumen membuat keputusan pembelian.

#### **c. Tingkat Keterlibatan**

Menetapkan mengapa ia termotivasi untuk mencari informasi tentang produk dan merek tertentu, tetapi mengabaikan produk dan merek lain,

### **2 . Faktor Psikologis**



Faktor yang berbeda didalam para individu, sebagian menetapkan perilaku umum orang tersebut dengan demikian mempengaruhi perilaku konsumen adalah:

- a. Persepsi : proses penilaian pengorganisasian dan penginterpretasikan masukan informasi untuk menghasilkan makna.
- b. Motif : Kekuatan energi internal yang mengerakan kegiatan seseorang kearah pemenuhan kebutuhan atau pencapaian sasaran.
- c. Kemampuan dan pengetahuan : para individu memiliki beragam kemampuan kesanggupan dan efisiensi dalam melakukan tugas-tugas tertentu.
- d. Sikap : Menunjukan pada pengetahuan dan perasaan prinsip terkadang sebuah objek atau kegiatan tertentu.
- e. Kepribadian : Menunjukan pada semua interval dan perilaku yang membuat seseorang itu unik.

### 3. Faktor Sosial

Kekuatan yang dikehendaki oleh orang lain terhadap perilaku pembelian faktor ini mencakup :

- a. Peran dan pengaruh keluarga : Peranan seorang individu mempengaruhi baik perilaku umum orang tersebut maupun perilaku pembelinya.
- b. Kelompok referensi : sebuah kelompok menjadi kelompok referensi ketika seorang individu mengidentifikasi dirinya dengan kelompok tersebut, Dengan demikian sehingga dia mengambil banyak nilai berbagi perilaku para anggota kelompok.
- c. Kelompok Sosial : Dalam masyarakat orang mengurus orang lain kedalam posisi yang lebih tinggi /lebih rendah.
- d. Budaya dan sub budaya : budaya mencakup nilai berbagai perilaku yang diterima dalam sebuah masyarakat tertentu.

### 4. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan ini sifatnya sangat luas dan menyangkut segala aspek kehidupan manusia. Oleh Stanto kebudayaan ini didefinisikan sebagai berikut : simbol dan fakta yang kompleks yang diciptakan oleh manusia diturunkan dari generasi ke generasi sebagai penentu dan pengatur tingkah laku manusia dalam masyarakat yang ada.

Simbol tersebut seperti : Perumahan, Produk, Karya seni dan sebagainya.

Kebudayaan merupakan faktor paling dasar dari keinginan dan perilaku seseorang. Bila makhluk-makhluk lainnya bertindak berdasarkan naluri, maka perilaku manusia umumnya dipelajari. (Setiadi, 2003 :11)

Kebudayaan adalah budidaya tingkah laku manusia. Tingkah laku manusia yang digerakkan oleh akal dan ucapan bathin itu merupakan keyakinan dan pengkaryaan terhadap sesuatu yang dianggap benar.

Kebudayaan adalah faktor-faktor penentu paling pokok dari keinginan dan perilaku seseorang. Makhluk yang lebih rendah umumnya ditentukan oleh naluri. Sedangkan manusia, perilakunya biasanya dipelajari dari lingkungan sekitarnya. Sehingga nilai persepsi referensi dan perilaku antara seseorang yang tinggal pada daerah tertentu dapat berbeda dengan orang lain pula. Sehingga pemasar sangat perkepentingan untuk melihat pergeseran kebudayaan (kultur) tersebut.

Agar dapat menyediakan produk-produk baru yang diinginkan konsumen faktor budaya mempunyai pengaruh yang paling luas dan yang paling dalam terhadap perilaku konsumen. Pemasar harus memahami yang dimainkan oleh kebudayaan (kultur), budaya (sub-Kultur) dan kelas sosial pembeli.(Simamora, 2004:7).

#### a. Sub Budaya

Tiap kebudayaan ( kultur ) mempunyai budaya ( sub-Kultur ) yang lebih kecil, atau kelompok orang dengan system nilai sama berdasarkan pengalaman dan situasi yang sama. Seperti kelompok kebangsaan yang bertempat tinggal pada suatu daerah mempunyai citra rasa dan minat etnik yang khas. Demikian pula halnya dengan kelompok keagamaan. Daerah geografi adalah merupakan budaya ( sub- kultur ), ini merupakan segmen pasar yang paling penting dalam pemasar sering menemukan manfaat dengan merancang produk yang disesuaikan dengan budaya ( sub- kultur ) tersebut. (Simamora : 2004 : 6).

Setiap kebudayaan terdiri dari sub budaya yang lebih kecil yang memberikan indentifikasi dan sosialisasi yang lebih spesifik untuk para anggotanya. Sub budaya dapat dibedakan menjadi empat jenis : kelompok nasionalisme, kelompok kenegaraan, kelompok ras dan arca geografis.

Sikap yang dipengaruhi oleh budaya dapat diidentifikasi antarlain:

- a. Rasa dan ruang
- b. komunikasi dan bahasa
- c. pakaian dan penampilan
- d. Makanan dan kebiasaan makan
- e. Waktu dan kesadaran akan waktu
- f. nilai dan norma
- g. kepercayaan dan sikap
- h. Proses mental dan pembelajaran
- i. kebiasaan kerja dan praktek (Setiadi, 2003:332).

#### b. Kelas Sosial

Kelas sosial adalah susunan yang relative permanen dan teratur dalam suatu masyarakat yang anggotanya mempunyai minat, nilai dan perilaku yang sama.kelas sosial tidak ditentukan oleh faktor tunggal seperti pendapatan, tetapi diukur sebagai kombinasi pekerjaan, pendapatan, pendidikan, kekayaan dan variabel lainnya. Kelas sosial memperlihatkan prefensi produk dan merek yang berbeda. (Simamora, 2004 : 8)

Kelas sosial yaitu bagian yang relatif homogen dan selalu ada dalam masyarakat yang tersusun secara hirarki dan para anggotanya memiliki nilai-nilai kepentingan dan perilaku yang sama.

#### 5. Faktor Sosial

Faktor sosial adalah seperangkat hubungan manusia yang rumit yang berinteraksi dalam banyak cara.

- a. Kultur rujukan/ kelompok referensi

Kelompok referensi terdiri dari seluruh kelompok yang mempunyai pengaruh langsung maupun tidak langsung terhadap sikap atau perilaku seseorang. beberapa diantaranya adalah kelompok-kelompok primer, dengan adanya interaksi yang cukup berkesenambungan seperti keluarga, teman dan tetangga dan teman sejawat. Kelompok-kelompok sekunder, yang cenderung lebih resmi dan mata interaksi yang terjadi anggotanya disebut kelompok aspirasi. Sebuah kelompok diasosiatif ( memisahkan diri ) adalah sebuah kelompok yang nilai atau perilakunya tidak disukai oleh individu, para pemasar berusaha mengidentifikasi kelompok-kelompok referensi dari konsumen sasaran mereka.

Orang umumnya sangat dipengaruhi oleh kelompok referensi pada tiga cara:

1. Kelompok referensi memperlihatkan pada seseorang perilaku dan gaya hidup baru
  2. Mereka juga mempengaruhi sikap dan sikap jati diri seseorang karena orang tersebut umumnya ingin menyesuaikan diri.
  3. Mereka menciptakan tekanan untuk menyesuaikan diri yang dapat mempengaruhi pilihan produk dan merek seseorang.
6. Keluarga

Kita dapat membedakan antara keluarga dalam kehidupan pembeli yang pertama adalah : Keluarga orientasi yang merupakan orang tua seseorang. Dari orang itulah seseorang mendapatkan pandangan tentang agama, politik, ekonomi dan merasakan ambisi pribadi nilai atau harga diri dan cinta. Keluarga prokreasi yaitu pasangan hidup anak-anak seseorang keluarga merupakan organisasi pembeli dan konsumen yang paling penting dalam satuan masyarakat dan telah diteliti secara intensif. ( Setiadi, 2003 : 12 ).

## 7. Peran dan Status

Seseorang umumnya berpartisipasi dalam kelompok selama hidupnya keluarga, klub, organisasi. Posisi seseorang dalam setiap kelompok dapat diidentifikasi dalam peran-peranan dan status sosial. Tiap peran membawa status yang mencerminkan penghargaan umum oleh masyarakat. Contohnya adalah direktur memakai pakaian yang mahal dan mengendarai Mercedes Benz. (Simamora, 2004 :9)

## 8. Faktor Pribadi

### a. Umur dan tahapan dalam hidup

Konsumsi seorang juga bentuk oleh tahapan siklus hidup keluarga. Beberapa penilaian terakhir telah mengidentifikasi tahapan-tahapan dalam hidup psikologis.

Orang-orang dewasa biasanya mengalami perubahan atau transformasi tertentu pada saat mereka menjalani hidupnya. (Setadi, 2003 : 13)

### b. Pekerjaan/Jabatan

Pekerjaan seseorang mempengaruhi barang dan jasa yang dibelinya. Dengan demikian pemasar dapat mengidentifikasi kelompok yang berhubungan dengan jabatan yang mempunyai minat terhadap produk mereka.

### c. Keadaan Ekonomi

Keadaan ekonomi sangat mempengaruhi pihak produk. Pemasar yang produknya peka terhadap pendapatan dapat dengan seksama memperlihatkan kecenderungan dalam pendapatan pribadi, tabungan dan tingkat suku bunga jadi

indikator-indikator ekonomi tersebut menunjukan daya resesi, pemasar dapat mencari jalan untuk mendapatkan posisi produknya.

d. Gaya hidup

Orang yang berasal budaya (sub kultur) dan pekerjaan yang sama dapat mempengaruhi gaya hidup yang berbeda. Gaya hidup seseorang menunjukan pola kehidupan yang bersangkutan yang tercermin dalam kegiatan, minat dan pendapatan. Konsep gaya hidup apabila digunakan oleh pemasar secara cermat, dapat membantu untuk memahami nilai-nilai konsumen yang terus berubah dan bagaimana nilai-nilai tersebut mempengaruhi perilaku konsumen.

e. Kepribadian dan konsep diri

Tiap-tiap orang mempunyai kepribadian yang khas dan ini akan mempengaruhi perilaku pembelinya. Kepribadian mengacu pada karakteristik psikologis yang unik yang menimbulkan tanggapan relatif konstan terhadap lingkungan kita sendiri. Kepribadian sangat bermanfaat untuk menganalisa perilaku konsumen bagi beberapa pilihan produk atau merek. Atau pemasar juga dapat menggunakan konsep diri atau citra seseorang. Untuk memahami perilaku konsumen, pemasar dapat melihat pula hubungan antara konsep telah berbau dalam tanggapan konsumen terhadap mereka. (Kotler, 2003:217)

### **2.13. Penelitian Terdahulu**

Zul efendi (2005) penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab kredit macet tunggakan pada kelompok sembako dalam menggunakan dana program pengembangan kecemasan (PPK) di kelurahan kembang harum

serta untuk mengetahui usaha bagi pihak pelaksana PPK dalam mengatasi kredit macet tersebut.

Penelitian ini dilaksanakan di kelurahan kembang harum kecamatan pasir penyu Kabupaten Indragiri Hulu, yang merupakan kelurahan yang mendapat bantuan dana PPK .

Teknik analisis data dilakukan dengan cara “analisis deskriptif” dengan sampel 35 orang, yaitu 1 orang camat 1 orang PjOK ( Penanggung jawab Operasional Kegiatan ), 1 orang PjAK ( Penanggung jawab Administrasi Kegiatan), 2 orang ISK ( intansi Sektor Kecamatan), 1 orang KM-Kab ( Konsultan Manajemen Kabupaten ), 1 FK (Fasilitator Kecamatan), 2 orang Tim Verifikasi, 4 orang UPK (Unit Pengelolah Keungan), 1 orang lurah kepala desa, 1 orang LKMD (Lembaga Keteahan Masyarakat desa), 3 orang TPK(Tim Pelaksanaan Kegiatan), 2 orang FD (Fasilitator Desa), 2 orang TDD( Tenaga Teknis Desa) dan 10 orang anggota peminjam.

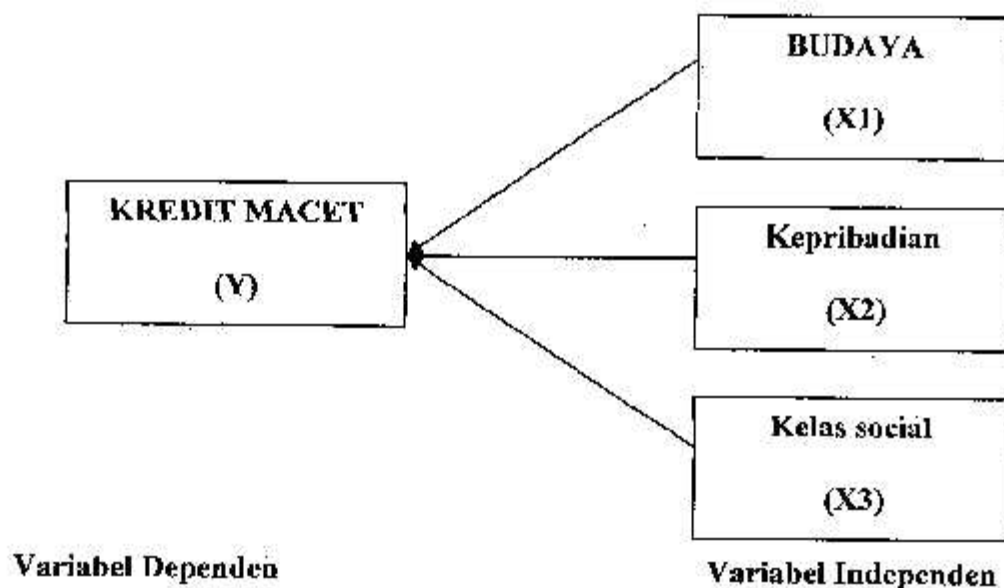
Muhammad Dinur (2008) Analisis Faktor-Faktor penyebab tunggakan kredit Sepeda Motor honda pada PT.Federal Intenational Finance Bangkinang Untuk wilayah Kecamatan Kampar Air Tiris

Penelitian ini dilakukan di PT. Federal International Finance Bangkinang yang berkedudukan di jalan Sisingsamangaraja Bangkinang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa pengaruh paribel bebas yang terdiri dari, analisis pemberian kredit, karakter konsumen, kapasitas konsumen, kondisis ekonomi, terhadap variabel terikat yaitu tunggakan kredit.

Responden dalam penelitian ini adalah parah konsumen yang mengalami tunggakan kredit pada PT. Federal International Finance Bangkinang khususnya

untuk wilayah kecamatan kampar yang berjumlah 32 orang, dimana pengambilan sampel dilakukan dengan sistem sampling jenuh di mana seluruh populasi di jadikan sampel. Dalam menganalisis data yang dikumpulkan dengan menggunakan metode deskriptif dan kuantitatif, kemudian dari hasil penelitian tersebut dianalisis dengan menggunakan regresi linear berganda.

Berdasarkan hasil analisis program SPSS menunjukkan nilai  $f_{hitung}$  sebesar 35,824 > dari nilai  $f_{tabel}$  2,61. dengan demikian  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor penyebab tunggakan kredit adalah : analisis pemberian kredit, karakter konsumen, kondisi ekonomi.



**Gambar I. II**  
**Paradigma penelitian**

#### **2.14. Hipotesis**

Diduga kredit macet dana PPK Desa Tanah Bekali Kecamatan Pangean disebabkan oleh faktor budaya, kepribadian, dan kelas sosial.



## **2.15. Variabel penelitian**

Adapun variabel-variabel penelitian ini adalah sebagai berikut:

Y : Kredit Macet

X1 : budaya

X2 : Kepribadian

X3 : Kelas sosial

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Lokasi penelitian yang penulis lakukan adalah di Desa Tanah Bekali Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2010.

#### **3.2. Jenis dan Sumber Data**

Dalam melaksanakan penelitian ini, penulis memerlukan data dan informasi yang lengkap dan akurat. Adapun jenis dan sumber data dalam penelitian ini terdiri:

##### **1. Data primer**

Merupakan data yang didapat dari sumber pertama baik dari individu atau perorangan. Dalam penulisan ini data primernya penulis peroleh melalui wawancara langsung dengan ketua kelompok dari objek penelitian, yaitu PPK di Kecamatan Pangean, selanjutnya data primer dilengkapi dengan pengisian kuisioner.

##### **2. Data Skunder**

Merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan dari sumber-sumber yang telah ada, jadi yang merupakan data sekundernya adalah data dalam bentuk yang sudah disiapkan oleh pihak PPK, berupa laporan-laporan bulanan (Kuncoro,2003:127).

### **3.3. Populasi dan Sampel**

Dalam penulisan ini responden yang diambil adalah semua anggota kelompok tani yang berjumlah 38 orang. Karena jumlah anggota tidak banyak penulis menggunakan metode sensus yaitu seluruh populasi dijadikan sampel.

### **3.4. Metode Pengumpulan Data**

#### **1. Kuisioner**

Penulis membuat kuisioner yaitu alat pengumpulan data dalam penelitian ini untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan dari sampel yang ada dengan membuat suatu daftar pertanyaan yang berupa lembaran angket atau kuisioner yang diajukan kepada para responden.

Adapun untuk menganalisa hasil kuisioner digunakan skala likert dimana setiap jawaban yang tersedia diberi bobot nilai (Nazir, 2003: 860). Dengan ketentuan pertanyaan untuk 1 s/d 5 diantara kategori yang digunakan adalah:

Jika memilih A diberi skor 5

Jika memilih B diberi skor 4

Jika memilih C diberi skor 3

Jika memilih D diberi skor 2

Jika memilih E diberi skor 1

#### **2. Interview**

Interview yaitu teknik wawancara langsung dengan ketua dan anggota yang berhubungan dengan organisasi serta pihak – pihak yang terkait dengan penelitian.

### **3.5. Validitas dan Reabilitas**

#### **1. Uji validitas**

Validitas alat ukur adalah akurasi alat terhadap yang diukur walaupun dilakukan berkali-kali dan dimana-mana (Bugin, 2005:97). Uji validitas dilakukan untuk mengetahui apakah alat ukur yang telah disusun dapat digunakan untuk mengukur apa yang hendak diukur secara tepat. Validitas suatu instrument akan menggambarkan tingkat kemampuan alat ukur yang digunakan untuk mengungkapkan suatu yang menjadi sasaran pokok pengukuran. Dengan demikian permasalahan validitas instrument (angket) akan menunjukkan pada mampu tidaknya instrument (angket) tersebut untuk mengukur objek yang diukur.

Jika  $r \text{ hasil} < r \text{ tabel}$  dapat disimpulkan bahwa instrument yang digunakan tidak valid, sebaliknya jika  $r \text{ hasil} > r \text{ tabel}$  maka dapat disimpulkan bahwa instrument yang digunakan valid( Santoso, 2005: 136).

#### **2. Uji Reliabilitas**

Reliabilitas alat ukur adalah kesesuaian alat ukur dengan yang diukur, sehingga alat ukur itu dapat dipercaya atau dapat diandalkan( Bugin, 2005: 96). Uji reliabilitas atau kehandalan suatu instrument penelitian ( dalam hal ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang terkandung didalam kuesioner/ angket penelitian) perlu dilakukan pengujian diawal suatu analisa sebelum dilakukan

pengujian-pengujian tahap berikut kadang didalam kuesioner/ angket penelitian) perlu dilakukan pengujian diawal suatu analisa sebelum dilakukan pengujian-pengujian tahap berikutnya. Hal ini bertujuan karena uji reliabilitas akan dapat menunjukkan konsistensi dari jawaban-jawaban responden terhadap pertanyaan yang diajukan atau dapat juga dikatakan menunjukkan adanya kesamaan jawaban ( yang selanjutnya menjadi data) dalam waktu yang berbeda.

Dengan demikian, uji reliabilitas ini menjadi salah satu syarat penting yang berlaku pada metode penyebaran kuesioner. Bila dari di uji reliabilitas menunjukkan tingkat konsistensi yang rendah maka kemungkinan pertanyaan yang diajukan dalam kuesioner tidak dapat ditangkap dengan baik oleh responden, sehingga bila diajukan dalam waktu yang berbeda, jawabanpun akan berbeda.

Dasar pengambilan keputusan uji reliabilitas adalah jika  $\alpha > 0,6$  maka butir atau variabel tersebut reliabel, sebaliknya jika  $\alpha < r$  table maka butir atau variabel tersebut tidak reliabel (nunnally, dalam ghozali:2005:42)

Dalam penelitian ini diuji validitas dan reliabilitas dihitung dengan menggunakan bantuan program SPSS dan hasilnya akan disajikan pada bab pembahasan.

### **3.6. Analisis Data**

Untuk menganalisa data yang dilakukan penulis dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode kuantitatif yaitu:

Jawaban responden atas pertanyaan yang akan diberikan bobot nilai.  
(Burhan, 2005 : 46 )

Untuk mengukur yang pengaruhi variabel budaya, kepribadian dan kelas sosial terhadap kredit macet, dalam penelitian ini digunakan metode kuantitatif yaitu menggunakan analisis regresi linier berganda, dengan persamaan linier sebagai berikut:(Djarwanto, 2002:309).

Rumus yang digunakan adalah regresi linier berganda

$$Y = a + b_1x_1 + b_2x_2 + b_3x_3 + e$$

Dimana :

Y : Kredit macet

a : konstanta

X1 : Budaya

X2 : Kepribadian

X3 : Kelas social

b<sub>1</sub>,b<sub>2</sub>, b<sub>3</sub> : Koefisien Regresi

e : Standar Error

Berdasarkan model regresi tersebut dapat dilakukan beberapa pengujian

#### 1. Uji T

Uji -t ini untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh variabel indenpenden X<sub>1</sub> dan X<sub>2</sub> terhadap variabel dependen (Y) dengan asumsi variabel lainnya adalah konsta (Kuncoro, 2003:97). Langkah-langkah pengujian diawali dengan membuat formulasi hipotesis sebagai berikut.

##### 1). Menentukan hipotesis nihil (H<sub>0</sub>) dan hipotesis alternaif (H<sub>1</sub>)

H<sub>0</sub>: b<sub>i</sub>=0, artinya tidak ada pengaruh antara variabel independen(X<sub>i</sub>) terhadap variabel depeden (Y)

H1:  $b_i < 0$ , artinya ada pengaruh antara variabel independen ( $X_i$ ) terhadap variabel dependen ( $Y$ ).

2). Menentukan tingkat signifikan dengan tabel

3). Mencari  $t$  hitung dengan Rumus :

$$t \text{ hitung} = \frac{b_i}{s_{b_i}}$$

Keterangan:

$b_i$  = Koefisien regresi variabel independen ke  $i$ .

$s_{b_i}$  = standar deviasi

4). Keputusan

$H_0$ : diterima bila  $t \text{ hitung} < t \text{ tabel}$ ,  $H_1$  ditolak

$H_1$  : diterima bila  $t \text{ hitung} > t \text{ tabel}$ ,  $H_0$  ditolak.

2. Uji -F

Uji -F ini digunakan untuk mengetahui seberapa jauh variabel independen ( $X_1, X_2$ ) secara bersama –sama berpengaruh terhadap variabel dependen ( $Y$ ) (Kuncoro, 2003:98). Langkah –langkah pengujian diawali dengan membuat formalasi hipotesis sebagai berikut:

$H_0$ :  $b_1, b_2 = 0$ , artinya variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

$H_1$  :  $b_1, b_2 \neq 0$ , artinya variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen.

2). Menentukan tingkat signifikan dengan F-tabel.

3). Mencari  $F$ -hitung dengan rumus:

$$R = \text{koefisien } F = \frac{R^2 / (K-1)}{(1 - R^2) / (N-k)}$$

Keterangan :

$R^2$  = koefisien determinasi

N = Jumlah Sampel

K = Jumlah parameter

#### 4). Kesimpulan

$H_0$ : diterima bila  $F_{hitung} < F_{tabel}$ ,  $H_1$  ditolak.

$H_1$  : diterima bila  $F_{hitung} > F_{tabel}$ ,  $H_0$  ditolak.

### 3. Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) digunakan untuk mengetahui persentase variabel independen secara bersama-sama dapat menjelaskan variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah di antara nol dan satu. Jika koefisien determinasi ( $R^2$ ) = 1, artinya variabel independen memberikan informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel- variabel dependen. Jika koefisien determinasi ( $R^2$ ) = 0, artinya variabel independen tidak mampu menjelaskan variasi- variasi dependen (Kuncoro, 2001: 100).

Uji multikolinieritas adalah dengan VIF (Variance Inflation Faktor) dan CI (Ccondition index), jika  $VIF < 10$  atau  $CI < 10$ , tidak terdapat multikolinieritas. Untuk taraf signifikan, penulis menggunakan taraf signifikan sebesar 5% untuk memudahkan mengelolah dan menganalisis data dalam penelitian ini penulis menggunakan program SPSS (Statistical package for Social Scianci) versi 17.



**BAB IV**  
**GAMBARAN UMUM**  
**PROGRAM PENGEMBANGAN KECAMATAN (PPK)**

**4.1. Sejarah Program pengembangan Kecamatan (PPK)**

Di awal 1998, Pemerintah Indonesia dan Bank Dunia mengadakan serangkaian diskusi untuk menkonsepkan program pengembangan kecamatan (PPK). Pembahasan pada saat ini terjadinya gejolak politik dan ekonomi di Indonesia. Bencana kekeringan yang berkepanjangan mengakibatkan makin memburuknya kondisi masyarakat miskin di pedesaan. Pertumbuhan ekonomi turun hingga 4,9 % di tahun 1997 dan mencapai minus 14 % pada tahun 1998, bahkan rupiah sempat kehilangan nilai tukarnya hingga lebih dari 85% terhadap Dolar Amerika.

Pemerintah Indonesia menghadapi tantangan besar di bidang politik dan ekonomi. Di bidang politik, menimbulkan pertentangan di berbagai wilayah seperti Gerakan separatis di Aceh, Timor Timur dan Irian Jaya mengancam kesatuan negara, dan lain-lainnya. Hal ini disebabkan sistem politik yang sangat sentralisasi dan kurangnya kendali politik dan ekonomi di daerah. Sedangkan di bidang ekonomi, krisis ekonomi telah mengakibatkan pemerintah untuk memperbaiki perkembangan ekonomi yang semakin lemah. Jutaan orang miskin di pedesaan hidup di bawah garis kemiskinan dan jumlah penduduk yang hidup di garis kemiskinan meningkat dengan tajam.

Dalam transisi politik dan krisis ekonomi yang tidak menentu inilah PPK dirumuskan. PPK diluncurkan melalui Instruksi Presiden No.5 Tahun 1993, yang

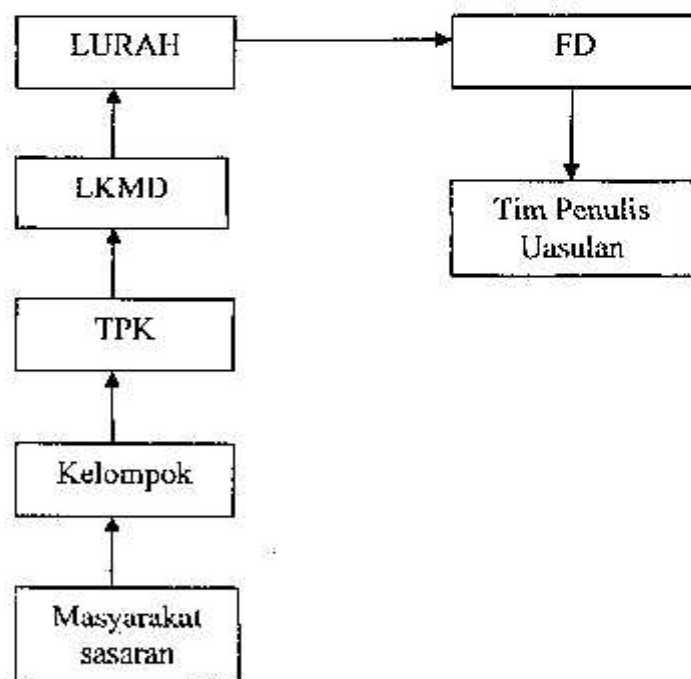
Dalam transisi politik dan krisis ekonomi yang tidak menentu inilah PPK dirumuskan. PPK diluncurkan melalui Intruksi Presiden No.5 Tahun 1993, yang menjadi bagian dari upaya menanggulangi krisis dan kemiskinan khususnya di wilayah pedesaan.

B. Struktur Program Pengembangan Kecamatan (PPK) di Desa Tanah Bekali.

Gambar : Struktur PPK.

#### 4.2. Struktur Program Pengembangan Kecamatan (PPK) di desa tanah bekali

Gambar 4.1: Struktur PPK di desah tanah bekali



Sumber : Kantor Lurah Tanah Bekali: 2011

#### 4.3. Tujuan PPK

Adapun tujuan PPK adalah : (Tim Koordinasi PPK, 1999:2)

### 1. Tujuan Umum

PPK bertujuan untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kemampuan kelembagaan masyarakat dan aparat melalui pemberian modal usaha untuk mengembangkan kegiatan usaha produktif dan pembangunan prasarana dan sarana yang mendukung kegiatan ekonomi pedesaan. PPK juga merupakan tempat belajar bagi masyarakat dan aparat pemerintah dalam mengambil keputusan yang adil dan terbuka.

### 2. Tujuan Khusus

- a. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam merencanakan, melaksanakan dan melestarikan kegiatan ekonomi masyarakat pedesaan.
- b. Meningkatkan kegiatan usaha, memperluaskesempatan kerja dan sumber pendapatan bagi masyarakat pedesaan.
- c. Menyediakan prasarana dan sarana bagi perkembangan kegiatan ekonomi masyarakat pedesaan.
- d. Meningkatkan kemampuan lembaga dan aparat di desa dan kecamatan untuk memfasilitaskan proses pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan program pembangunan.

### 4.4. Sasaran Kelompok dan Lokasi PPK

Adapun sasaran kelompok dan lokasi PPK adalah : (Tim Koordinasi Pengelolaan Bantuan PPK, 1999 : 3 )

1. Sasaran utama penerimaan dana bantuan PPK adalah kelompok penduduk miskin.

2. Sasaran lokasi penerimaan dana bantuan PPK adalah kecamatan miskin dengan prioritas yang dipilih berdasarkan kriteria:

- Kecamatan yang mempunyai jumlah desa tertinggal relatif lebih banyak.
- Kecamatan yang mempunyai jumlah penduduk miskin relatif lebih banyak.
- Musyawarah LKMD dan forum UDKP telah terbentuk dan berjalan.
- Kecamatan mengalami peningkatan pengangguran karena krisis moneter atau kecamatan mengalami kekeringan.

#### **4.5. Pendekatan dan Prinsip-Prinsip PPK**

##### **1. Pendekatan PPK**

Adapun pendekatan yang dilaksanakan oleh PPK adalah: (Tim Koordinasi PPK, 1999: 3)

- a. Pemihakan kepada penduduk miskin
- b. Pemberian kepercayaan kepada masyarakat untuk memilih kegiatan yang butuhkan.
- c. Memberikan akses informasi kepada setiap penduduk desa tanpa membedakan jenis kelamin, suku, agama, ras dan golongan mengenai peluang, kebebasan memilih dan memutuskan serta pelaksanaan kegiatan termasuk keuangannya.
- d. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian pembangunan.
- e. Kompetisi yang sehat dalam pengajuan usulan kegiatan.
- f. Swadaya masyarakat dalam pelaksanaan PPK dan pelestariannya.

##### **2. Prinsip- Prinsip PPK**

Adapun prinsip-prinsip PPK adalah : ( Tim Koordinasi PPK, 1999: 3 )

a. Desentralisasi

Dalam rangka mewujudkan desentralisasi PPK, maka pemerintah menyerahkan wewenang penuh kepada masyarakat untuk:

1. memanfaatkan dan mengelola dana PPK.
2. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan yang dibiayai oleh dana PPK.
3. Mempertanggung jawabkan pengelolaan dana PPK.

b. Keterbukaan

Segalah sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan PPK, terbuka untuk umum. Keterbukaan tersebut bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam hal:

1. Mengambil keputusan yang berkaitan dengan PPK, misalnya menentukan jenis kegiatan mengelola dan PPK.
2. Memperoleh informasi secara lengkap dan terus-menerus tentang segala sesuatu yang menyangkut PPK.
3. Menumbuhkan-kembangkan kepedulian dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan.
4. Mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan PPK.
5. Meningkatkan saling percaya di antara sesama pelaku PPK.

c. Partisipasi

Pengertian partisipasi dalam PPK adalah adanya keterlibatan masyarakat secara aktif dalam setiap kegiatan PPK. Salah satu wujud partisipasi adalah keterlibatan dalam pengambilan keputusan yang menyangkut dana PPK di kecamatan melalui forum UDKP.

d. Keterlibatan orang miskin

PPK mengharuskan keterlibatan orang miskin mulai dari pengambilan keputusan, penentuan usulan kegiatan, pelaksanaan dan manfaat hasil kegiatan.

e. Keterlibatan Perempuan

PPK mengharuskan adanya keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan pada semua tahap perencanaan dan pelaksanaan program, kegiatan dan hasil-hasilnya tidak memarginalkan komunitas perempuan.

f. kompetisi sehat

- Usulan- usulan kegiatan masyarakat harus dikompetisikan secara sehat sesuai dengan kriteria kegiatan untuk mendapatkan dukungan dana PPK.
- Setiap desa peserta berhak mengajukan usulan.
- Setiap desa yang mengajukan usulan tidak otomatis akan mendapatkan dana.
- Kompetisi di mulai dari dari pemilihan gagasan unggulan di tingkat dusun/ kelompok, penentuan usulan kegiatan melalui keputusan desa dalam musyawarah desa penentuan kegiatan terpilih melalui keputusan dalam forum UDKP.

g. Swadaya

Swadaya adalah kemauan dan kemampuan masyarakat yang disumbangkan untuk sukarela sebagian dari rasa ikut memiliki terhadap PPK. Swadaya bisa diwujudkan dengan menyumbangkan tenaga, dan maupun material untuk melaksanakan serta memelihara kegiatan yang diusulkan.

h. Hibah dan perguliran

- Dana PPK adalah hibah dari pemerintah pusat UDKP,
- untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana bagi kepentingan umum, dana yang disalurkan kepada kelompok/desa adalah bergulir hibah dengan

syarat masyarakat yang bersangkutan melakukan pengoerasian dan pemeliharaan.

- untuk kegiatan penyediaan modal usaha, dana yang disalurkan kepada kelompok adalah pinjaman yang harus dikembalikan ( Bersama dengan jasa pinjaman ) ke UPK sesuai dengan jadwal yang disepakati bersama dan kemudian digulirkan kembali ke masyarakat.
- Pinjaman yang dikenakan jasa pinjaman dihitung dari sisah pinjaman ( Perhitungan jasa pinjaman menurun). Sedangkan besarnya jasa pinjaman minimal sama dengan bunga pasar ( Berpatokan pada bunga pasar BRI setempat pada saat usulan masyarakat diverifikasi).
- Unit pelaksanaan pengelolaan keuangan forum UDKP dinamakan UPK.

i. Sanksi

Saksi dikenakan bagi desa-desa yang memelihara prasaran yang didanai PPK dan desa-desa, kelompok yang lalai dalam melunasi pinjaman dana PPK.

j. Jenis kegiatan dan daftar larangan

- Secara garis besar ada 2 jenis kegiatan utama, yaitu penyediaan modal usaha produktif dan pembangunan prasarana/ sarana yang menunjang ekonomi pedesaan.
- PPK terbuka untuk semua usulan kegiatan, terutama jenis kegiatan yang menguntungkan dan melibatkan banyak masyarakat miskin serta memiliki potensi berkembang dan berkelanjutan, kecuali beberapa jenis kegiatan yang dilarang.
- Kegiatan yang termasuk daftar larangan ( Negative List ) adalah :

1. Pembangunan /reabilitas bangunan kantor dan tempat ibadah.

2. Pembiayaan gaji pegawai Negeri.
3. Pembelian kapal ikan yang berbobot diatas 10 ton dan perlengkapannya.
4. Pembiayaan chainsaw, senjata, bahan peledak, asbes dan bahan-bahan lain yang merusak lingkungan.
5. Pembiayaan kegiatan yang memperkerjakan anak-anak di bawah usia kerja.
6. Pembiayaan kegiatan politik Praktis/partia politik.
7. Pembiayaan apa saja yang berkaitan dengan militer atau angkatan bersenjata.
8. pembelian pupuk kimiawi, obat pertanian kimiawi ( Insktisida, partisida, hebersida, dan sebagainya ).

k. Jumlah Usulan

- Setiap desa boleh mengajukan paling banyak dua usulan.
- jika desa mengajukan dua usulan, maka satu diantaranya harus terbukti benar berasal dari perempuan.
- Setiap usulan dapat terdiri satu atau beberapa kegiatan yang berasal dari masyarakat.

l. Pelestarian

- Masyarakat bertanggung jawab terhadap kesinambungan setiap usulan kegiatan usulankan.
- Setiap usulan harus meyeritakan rencana konkret tentang penggunaan dan pemeliharaan ( terutama untuk kegiatan prasarana/saran ) dan jadwal pengembalian pinjaman untuk modal usaha.
- Segala keputusan yang menyangkut pergukiaran dan tindak lanjut pengembangan kegiatan disepakati dalam forum, di desa dalam Mushangdes dan di kecamatan pada forum UDKP.



#### 4.6. Cara Kerja PPK

Distribusi dana dalam kecamatan dilaksanakan melalui forum UDKP ke LKMD. Forum UDKP terdiri dari lurah dan ketua LKMD serta 3 wakil ( 1 orang laki-laki dan 2 orang perempuan ) yang dipilih dari masing-masing desa yang berpartisipasi. UDKP juga membentuk LKMD untuk mengelolah dana PPK dan mengawasi usulan-usulan skala besar lainnya.

##### 1. Siklus Proyek PPK

Pelaksanaan kegiatan PPK melalui beberapa tahapan, adalah:

- a. *Deseminasi informasi.* Deseminasi informasi PPK dapat di lakukan dengan berbagai cara, lokakarya dilakukan di tingkat propinsi, kabupaten dan kecamatan, untuk mensosialisasikan informasi dan mempepulerkan program ini.
- b. *Perencanaan.* Rapat perencanaan berlangsung di tingkat dusun dan desa. Fasilitator Desa dan Fasilitator kecamatan memberi informasi mengenai prosedur PPK dan mendorong warga desa untuk menyampaikan usulan yang didanai PPK.
- c. *Penyiapan usulan dan verifikasi.* Masing-masing desa LKMD desa dapat mengajukan malsimum dua proposal ke forum UDKP. Jika ada dua usulan, maka usulan kedua harus bersal dari kelompok perempuan. Usulan yang diajukan bisa digabungkan antara kegiatan ekonomi dan prasaran jika dikendaki oleh masyarakat desa. Jenis kegiatan terbuka untuk semua investasi produktif kecuali yang terdapat pad daftar larangan.

**Untuk Kegiatan ekonomi.**kelompok peminjam haruslah usahanya berumur paling sedikit 1 tahun. Tingkat suku bunga harus mengikuti tingkat pasar dan jangka waktu pengembalian pinjaman maksimum 18 bulan. Jadwal pengembalian harus sesuai dengan jenis kegiatan ekonomi yang dilakukan dan menguntungkan dan harus disetujui anggota kelompok.

**Untuk kegiatan prasarana.** Pembangunan prasarana umum harus memenuhi standar mutu desain teknis, bermanfaat untuk masyarakat miskin, dan memasukan rencana serta anggaran pemeliharaan setelah kegiatan dilaksanakan, termasuk pengelolaan dan besarnya iuran.

**Verifikasi.** Tim verifikasi kecamatan biasanya terdiri dari tokoh-tokoh masyarakat, Fasilitator kecamatan dan tenaga teknis yang sesuai dengan rekomendasi oleh konsultan manajemen kabupaten. Tim Verifikasi meninjau kriteria sebagai berikut:

- Apakah usulan tersebut layak secara teknis dan ekonomis, apakah bermanfaat bagi orang banyak, khususnya orang miskin.
- Apakah ada rencana pemeliharaan ( Atau rencana pengambilan pinjaman untuk pinjaman ekonomi).
- Apakah masyarakat benar-benar berpartisipasi dalam merumuskan gagasan usulan, dan apa bentuk sumbangan dari masyarakat.

Tahap verifikasi biasanya berlangsung selama 3-4 minggu. Tahap ini sangat penting untuk menyaring kegiatan-kegiatan yang memiliki rancangan dan kualitas yang baik.

d. *Pemilihan Proyek.* Usulan desa dibahas di tingkat kecamatan dan forum UDKP

II. Forum ini meninjau temuan Verifikasi dan membahas manfaat anggaran dari

setiap usulan. Keputusan akhir dari pertemuan UDKP di pasang di papan informasi dan diberitahu kepada warga desa melalui pertemuan di tingkat desa, Musbandes III dan pertemuan dusun atau kelompok.

e. *Pelaksanaan Proyek*.setelah diputuskan kegiatan mana yang layak didanai, Tim teknis desa dibentuk dan kontrak. Kontrak tersebut ditandatangani oleh LKMD dan diketahui oleh konsultan kabupaten. Setelah desain teknis selesai lalu mencaritenaga kerja.

f. *Pemeliharaan*. Setelah kegiatan prasarana selesai, tim pemeliharaan dan biaya retribusi segera ditetrapkan. Masyarakat desa membentuk panitia pelaksana dan pemeliharaan yang bertanggung jawab untuk mengawasi pemeliharaan. Untuk bantuan ekonomi, pengembalian pinjaman dikumpulkan oleh UPK untuk jangka waktu maksimum 18 bulan.

## 2. Manajemen PPK

PPK secara teknis dibantu oleh tim konsultan, terutama konsultan kabupaten dan Fasilitator kecamatan.

Sehubungan dengan peran dan tanggung jawab pengelolaan PPK, Sekretariat proyek PMD ( Pengembangan Masyarakat Desa) ditingkat nasional menerbitkan panduan resmi dan menentukan kebijakan proyek berdasarkan perjanjian. Sekretariat juga menagani semua kontrak dan verifikasi tagihan. Selain itu, sekretariat juga melaksanakan hubungan resmi dengan bank Dunia dan lembaga-lembaga pemerintah daerah.

Parah konsultan bertanggung jawab atas hal-hal teknis sehari-hari, mengklarifikasikan dan menjalankan kebijakan, mengawasi dan

mengevaluasi semua konsultan, menyusun kerangka acuan dan pedoman, serta memberikan saran atas semua pekerjaan monitoring dan evaluasi program.

#### **4.7. Tugas dan Tanggung Jawab Pelaku PPK**

##### **1. Pelaku PPK di Kecamatan**

###### **a. Camat**

Camat adalah pembina dan penanggung jawab kegiatan PPK di kecamatan.

Adapun tugas dan tanggung jawabnya adalah:

- 1) Mengikuti sosialisasi PPK di propinsi dan kabupaten.
- 2) Mengusulkan Kasi PMD dan salah satu staf kecamatan lainnya kepada bupati untuk ditetapkan sebagai pinrop (PjOK) dan Benpro (PjAK).
- 3) Menyelenggarakan sosialisasi di kecamatan untuk menyamakan persepsi , filosofi dan mekanisme PPK, sesuai dengan pedoman dan petunjuk yang ada.
- 4) Memantau pelaksanaan proses pengusulan kegiatan oleh desa pada forum UDKP bersama kasi PMD (PjOK)
- 5) Memantau Proses verifikasi usulan.
- 6) Menerbilkan surat keputusan tentang pengesahan UPK yang dibentuk melalui forum UDKP.
- 7) Mengeluarkan surat penetapan Camat untuk mengukuhkan nama desa, jenis kegiatan dan jumlah dana PPK, berdasarkan hasil keputusan forum UDKP.
- 8) Mengetahui surat perjanjian pemberian bantuan (SPPB) yang disiapkan oleh parah ketua I LKMD dan PjOK.

- 9) Memantau pelaksanaan kegiatan PPK dan melaporkan masala-masalah serta tindak lanjutnya yang dihadapi kepada TK PPK kabupaten.
  - 10) Menerima tembusan laporan bulanan dari LKMD, agar dapat mengikuti kemajuan kegiatan PPK.
  - 11) Memantau pembuatan rencana pemeliharaan oleh LKMD yang dibantu TTD.
  - 12) Mengetahui surat pernyataan penyelesaian pekerjaan (SP4) yang dibuat oleh ketua LKMD ketua pelaksanaan di desa yang bersangkutan.
  - 13) Membuat laporan bulanan kepada bupati mengenai pelaksanaan PPK di wilayahnya.
- b. PjOK (penanggung Jawab Operasional Kegiatan)

Kasi PMD sebagai pimrop/PjOK mempunyai tugas dan tanggung jawab:

1) Tahap Persiapan

- Mengikuti sosialisasi dan pelatihan PPK di propinsi.
- Bersama FK, membantu camat menyelenggarakan sosialisasi PPK di kecamatan.
- Bersama FK melaksanakan sosialisasi PPK di desa.
- Dengan bantuan FK, menyiapkan administrasi kegiatan PPK.

2) Tahap Perencanaan

- Bersama FK melati FD.
- Bersama FK mendukung FD dalam mengsosialisasikan PPK ke masyarakat.
- Bersama FK memfasilitaskan musyawarah desa.
- Bersama FK memfasilitaskan pelaksanaan forum UDKP.

- Mempersiapkan surat penetapan Camat tentang:
  - a. Pengukuran nama desa dan usulan yang akan didanai oleh PPK.
  - b. Pengesahan UPK.

### 3) Tahap Pelaksanaan

- Bersama LKMD menyiapkan dan menandatangani berita acara pembayaran/pemarikan dana (BAPP).
- Menandatangani dokumen pencairan dana dan mengajukan ke KPKN sesuai dengan SPPB.
- Menyiapkan dan mengajukan SPP-LS (Surat permintaan pembayaran Langsung) ke KPKN.
- Bersama LKMD menandatangani dokumen SP4 serta mendapatkan pengesahan camat dan KM-Kab.
- Membantu mengkoordinasi kegiatan antar desa, jika ada.
- Bersama UPK mengatur dan memastikan pengembalian dana pinjaman bergulir sesuai perjanjian yang ditandatangani oleh kelompok penerima bantuan.
- Bersama FK dan UPK meningkatkan Partisipasi masyarakat.
- Memantau papan informasi agar memuat informasi yang lengkap dan baru.
- Memberikan laporan bulanan tentang kemajuan pelaksanaan PPK, termasuk diseminasi informasi melalui papan-papan informasi kepada camat.
- Mengelola dana PAP kecamatan sesuai dengan alokasi yang diterapkan.

- Bersama FK memantau pelaksanaan kegiatan PPK dan menangani permasalahan yang muncul serta melaporkan kepada TK-PPK kabupaten melalui camat.

#### 4) Tahap Pelestarian

- Bersama FK memfasilitasi forum UDKP yang membahas perguliran pengembalian dana dan mendorong keberlanjutan program.
- Bersama FK memantau pelaksanaan kegiatan pemanfaatan, pemeliharaan sarana dan prasarana dan pengembangan kegiatan ekonomi.

#### c. PjAk (Penanggung Jawab administrasi Kegiatan)

##### 1) Tahap Persiapan dan Perencanaan

- Membantu PjOK menyiapkan administrasi kegiatan PPK.
- Mengikuti sosialisasi PPK di kabupaten.
- Membantu PjOK membuat rencana penggunaan dana PAP kecamatan.

##### 2) Tahap Pelaksanaan

- Membantu PjOK untuk mengelola dan membuat pertanggung jawaban dana PAP kecamatan.
- Bersama PjOK membuat dan mengajukan SPP-LS kepada KPKN sesuai dengan tahapan dan tata cara pencairan dana.
- Membantu PjOK dalam mempertanggungjawabkan administrasi keuangan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- sesuai UPK dalam bidang administrasi.

- Bersama UPK membantu Tim pelaksana, LKMD, kelompok dalam bidang administrasi.

d. ISK (Instansi Sektor Kecamatan)

Adapun tugas dan tanggung jawab ISK ialah :

- Mengikuti sosialisasi PPK di kecamatan .
- Menghadiri dan terlibat dalam pertemuan UDKP.
- Memadukan program sektoral dan program instansi masing-masing dengan PPK (Membantu Tim Verifikasi dalam menjalankan tugasnya)

e. KM-Kab (Konsultan Manajemen Kabupaten)

Bertugas mendampingi TK-PKK kabupaten melalui sekretariat TK-PPK kabupaten dalam mengelolah bantuan PPK di kabupaten.

F. FK (Fasilitator Kecamatan)

FK adalah pendamping yang membantu aparat dan masyarakat di kecamatan yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan PPK. Adapun tugas dan tanggung jawabnya ialah:

1) Tahap Persiapan

- Memfasilitaskan sosialisasi/disceminasi PPK di kecamatan dan di desa.
- Mengumpulkan data/informasi pokok kecamatan dan desa yang dapat memanfaatkan untuk mendapatkan kegiatan PPK.
- Menginventarisasi sumber-sumber pendanaan/kredit setempat, prosedur dan persyaratan serta tingkat bunga sebagai pilihan alternatif.

2) Tahap perencanaan dan pemilihan kegiatan



- Bersama PjOK membantu memfasilitaskan Musbangdes dalam proses Pemilihan calon FD (dari daftar short/longlist) berdasarkan kriteria yang akan dipilih dan disepakati dalam musbangdes I.
  - Bersama PjOK melaksanakan pelatihan FD.
  - Membantu FD dalam memfasilitaskan pelaksanaan penggalan gagasan dan memeriksa daftar gagasan yang masuk.
  - Membantu LKMD dalam forum Musbangdes I serta membantu FD dan LKMD dalam menyelenggarakan Musbangdes II dan III.
  - Membantu proses penulisan usulan, jadwal pelaksanaan kegiatan dan jadwal pengembalian pinjaman anggota.
  - Bersama PjOK memfasilitaskan rapat kecamatan untuk pembentukan Tim Verifikasi yang akan ditetapkan oleh camat.
  - Bersama PjOK membantu proses verifikasi usulan kegiatan.
  - Bersama PjOK mengkoordinasikan usulan-usulan desa yang tidak dibiayai PPK untuk diajukan ke rakorbang II atau untuk dipertimbangkan sebagai prioritas dana perguliran.
  - Memfasilitasi penyelenggaraan forum UDKP.
- 3) Tahap pelaksanaan, pemantauan dan supervisi
- Bersama PjOK memberikan bimbingan teknis pengelolaan kegiatan yang akan dilakukan oleh Tim pelaksana.
  - Membantu pelaksana mendapatkan dan memilih TTD yang akan memberikan bantuan teknis pelaksanaan kegiatan.

- Membantu LKMD, UPK dan PjOK untuk mempersiapkan dokumen dalam proses pencairan dana dari KPKN serta penyaluran dana ke masyarakat.
- Bersama PjOK melaksanakan dan memfasilitasi pelatihan UPK.
- Membantu dan menyetujui laporan kemajuan dan kualitas fisik sebagai persyaratan pencairan dana dari rekening kolektif LKMD.
- Mendokumentasikan laporan kemajuan kegiatan.
- Memantau Tim pelaksana/LKMD dalam memantau dan mensupervisi TTD dan pelaksana kegiatan PPK.
- Memantau dan memfasilitaskan UPK dan Tim pelaksana/LKMD dalam mengelolah dan mengembalikan pinjaman.

#### 4) Tahap Pelestarian

- Untuk kegiatan sarana dan prasarana, FK membantu LKMD/Tim pelaksana untuk operasional dan pemeliharaan.
- Membantu UPK dalam pengembalian pinjaman dan pengembangan usaha serta perguliran dana kepada masyarakat lain.

#### g. Tim Verifikasi

Tim Verifikasi adalah suatu tim independen dari kalangan masyarakat di kecamatan yang memeriksa dan menilai kebenarannya serta kelayakan usulan kegiatan yang diajukan ke PPK. Adapun tugas dan tanggung jawabnya ialah:

- Memeriksa usulan sesuai kriteria PPK
- Memeriksa kegiatan yang diusulkan agar tidak tumpang tindih dengan program lain.
- Memeriksa kelengkapan administrasi semua usulan.

- Menilai kelayakan teknis, finansial, ekonomi dan dampak lingkungan.
- Memeriksa usulan bila memerlukan bantuan teknis mengenai kualifikasi dan besarnya biaya.
- Menyajikan hasil verifikasi dan memberikan penjelasan atas pertanyaan yang diajukan pada forum UDKP II.

#### h.UPK (Unit Pengelola Keuangan)

UPK adalah unit pengelola dana PPK pada kecamatan yang bersangkutan yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada forum UDKP. Adapun tugas dan tanggung jawabnya ialah :

- Mencatat, mendokumentasikan dan mengawasi kegiatan.
- Mengetahui dan menyetujui Permintaan dana dari LKMD.
- Membukukan pengguna dana PPK
- Mengatur dan memastikan pengembalian dana pinjaman bergulir sesuai dengan perjanjian.
- Melaporkan perkembangan kegiatan PPK, termasuk pembukuan dan pengembalian dana kepada forum UDKP secara teratur.
- Melakukan pemeriksaan pembukuan di desa dan kelompok.
- Bersama ketua I LKMD, FK membuka rekening kolektif di BRI unit/lembaga keuangan yang telah ditetapkan.
- Membuat rencana pengguna dana operasional.
- Bersama FK dan PjOK membuat jadwal pencairan dana PPK sesuai dengan kebutuhan yang telah disepakati.
- Mengikuti pelatihan UPK.

- Menempelkan informasi baik menggunakan dana pengelolaan dana PPK pada papan informasi.
- Melaksanakan kunjungan untuk menagih pengembalian pinjaman dari kelompok penerima bantuan.

## 2. Pelaku PPK di kelurahan/desa

### a. Lurah

Lurah bertanggung jawab atas kelancaran pelaksana PPK yang dilaksanakan di wilayahnya. Adapun tugas dan tanggung jawabnya ialah:

#### 1). Tahapan persiapan

- Mengikuti sosialisasi PPK di kecamatan
- Bersama ketua LKMD I, melakukan koordinasi dengan aparat lembaga-lembaga lain di desa untuk mempersiapkan Musbangdes.
- Menyelenggarakan dan memimpin Musbangdes untuk mensosialisasikan PPK.
- Mendorong terlaksanaka pertemuan kelompok dan dusun untuk sosialisasi PPK dan penggalan gagasan yang difasilitasi oleh FD.
- Memastikan informasi tentang PPK secara jelas, lengkap dan benar serta menarik.

#### 2). Tahap perencanaan

- Mendampingi LKMD menyelenggarakan Musbangdes I untuk memilih calon FD.

- Mendorong masyarakat berpartisipasi dalam penggalan gagasan dan penyusunan usulan kegiatan PPK.
- Memberikan data dan informasi tentang kondisi desa dan program lain yang relevan dengan PPK dalam berbagai pertemuan.
- Mengikuti forum diskusi UDKP.
- Memastikan informasi perkembangan PPK.

### 3). Tahap pelaksana

- Memfasilitaskan Musbangdes III untuk membentuk Tim pelaksana.
- Memantau pelaksana kegiatan PPK.
- Melaporkan Perkembangan pelaksanaan PPK secara periodik kepada camat.

### 4). Tahap pelestarian

- Bersama LKMD melakukan evaluasi pelaksana kegiatan.
- Mendorong efektnya operasionalnya, pemeliharaan dan pengembangan kegiatan yang didanai oleh PPK.

## b. LKMD (Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa)

Tugas dan tanggung jawab LKMD adalah:

- Melakukan sosialisasi mengenai PPK kepada masyarakat dengan dibantu oleh FD.
- Menyelenggarakan Musbangdes dalam perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian yang dibantu/difasilitasi oleh FK/FD.
- Menyelenggarakan Musbangdes untuk membentuk Tim pelaksana.
- Menyiapkan dokumen administrasi PPK.
- Melaporkan Kemajuan PPK kepada lurah.

- Bersama Tim pelaksana melaksanakan pengadaan barang, sewa peralatan dan pembayaran insentif.
- Mencatat/mengetahui pengembalian pinjaman serta menagih bila ada pinjaman yang menunggak.

#### c. FD (Fasilitator Desa)

FD adalah seorang yang memandu memfasilitaskan kegiatan PPK di tingkat kelompok, dusun dan desa. Adapun tugas dan tanggung jawab FD adalah:

##### 1) Tahap perencanaan

- Mengikuti pelatihan yang dilaksanakan oleh FK dan FjOK.
- Mensosialisasikan PPK kepada masyarakat desa setempat.
- Menumbuhkan dan mendorong partisipasi anggota masyarakat dalam pertemuan dan kegiatan kelompok.
- Menggali gagasan anggota masyarakat maupun kelompok masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya.
- Memantau kelompok masyarakat dalam penulisan usulan kegiatan PPK.
- Membantu LKMD menyelenggarakan Musbangdes II untuk menentukan usulan yang akan diajukan keUDKP II.
- Mensosialisasi hasil UDKP II dalam Musbangdes III.

##### 2) Tahap pelaksanaan

- Memotivasi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan kegiatan PPK.
- Membantu membuat laporan Tim pelaksana dan kelompok.
- Membantu kelompok untuk menjalin kerjasama antar kelompok dalam kegiatan ekonomi.

## **DAB V**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **5.1. Identitas Responden**

Pada bab ini akan diuraikan analisis penelitian dalam pembahasan mengenai Analisis kredit macet program PPK (Study kasus) perilaku kelompok tani desa tanah bekali di kecamatan Pangean Kab.Kuansing.

Pada penelitian ini analisis yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, dimana data di peroleh dengan cara menyebarkan pertanyaan kepada seluruh anggota PPK di desah Tanah Bekali Pangean sebanyak 38 orang. Data yang diperoleh kemudian di tabulasi untuk di analisis secara deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian meliputi deskriptif karakteristik responden, uji reabilitas dan validitas kuesioner setiap variabel, deskriptif variabel, analisis regresi linier berganda dan uji hipotesis. Pembahasannya akan dijelaskan sebagai berikut:

Identitas responden penulis mengagkat 4 item yaitu:

1. Umur
2. Jenis Kelamin
3. Tingkat Pendidikan
4. Lama Meminjam

##### **5.1.1 Identitas Responden Berdasarkan Umur**

Umur merupakan faktor yang menentukan seseorang dalam proses pengambilan keputusan. Semakin dewasa umur seseorang maka semakin banyak pertimbangan yang akan dilakukannya sebelum mengambil keputusan, begitu juga

dalam menilai kehijauan yang berlaku dalam organisasi tempat anggota tersebut meminjam.

Untuk mengetahui umur responden anggota PPK di desa Tanah Bekali Pangean dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel V. 1: Responden anggota berdasarkan Kelompok Umur**

No	Klasifikasi kelompok umur	Frekuensi	Persentase%
1	19 – 30 tahun	20	52.63 %
2	30 – 40 tahun	11	28.94 %
3	40 – 50 tahun	7	18.42 %
	<b>Jumlah</b>	<b>38</b>	<b>100%</b>

Sumber: *Data Olahan, 2010*

Dari tabel tersebut terlihat sebagian besar anggota PPK di desa Tanah Bekali Pangean, yang meminjam umur 19 -30 tahun 20 orang (52,63%), pada umur 30 -40 tahun 11 orang (28,94%), dan pada umur 40 -50 tahun 7 orang (18,42%)

### 5.1.2 Identitas Responden berdasarkan jenis kelamin

**Tabel V.2: Identitas responden berdasarkan jenis kelamin anggota PPK di desa tanah bekali pangean.**

No	Jenis kelamin	Frekuensi	Persentase%
1	Laki-laki	10	26.31
2	Perempuan	28	73,68
	<b>Jumlah</b>	<b>38</b>	<b>100%</b>

Sumber :*Data Olahan 2011*

Dilihat dari jenis kelamin sebagian besar anggota PPK di desa tanah bekali pangean berjenis kelamin perempuan, jumlah anggota perempuan 28 orang atau 73,68% dan laki-laki 10 orang atau 26, 31%.

### 5.1.3 Identitas Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

**Tabel V.3: Karakteristik Responden Menurut Tingkat pendidikan di PPK Desa Tanah Bekali pangean**

No	Klasifikasi Lama Meminjam(Bulan)	Jumlah Responde	Persentase%
1	SMA	18	47.36



2	SMP	15	39.47
3	SD	5	13.15
	<b>Jumlah</b>	<b>38</b>	<b>100%</b>

*Sumber :Data Olahan 2011*

Berdasarkan tabel tersebut, dapat dilihat bahwa sebagian besar anggota di PPK desa tanah bekali pangean berpendidikan SMA 18 orang (47,36%), yang berpendidikan SMP 15 orang (39,47%), dan yang berpendidikan SD sebanyak 7 orang (13.15%).

#### 5.1.4 Identitas Responden berdasarkan masa meminjam

**Tabel V.4: Klasifikasi Masa Meminjam Responden di PPK desa tanah bekali pangean**

No	Klasifikasi Lama Meminjam(Bulan)	Jumlah Responde	Persentase
1	0 – 3	6	15.78
2	4 – 7	13	34.21
3	8 – 12	19	50
	<b>Jumlah</b>	<b>38</b>	<b>100%</b>

*Sumber :Data Olahan 2011*

Dari tabel 5 dapat lihat bahwa anggota yang meminjam di PPK desa tanah bekali pangean cukup baik. Biasanya anggota yang berpengalaman akan lebih berhati-hati dalam melaksanakan tugasnya karena ia mengetahui betul.

#### 5.2. Analisis Teori Deskripsi Variabel Penelitian

Variabel-variabel yang akan diteliti meliputi budaya (X1) kelas sosial (X2) dan kepribadian (X3) sedangkan yang menjadi variabel terikatnya adalah kredit macet (Y).

### 5.2.1 Analisis Variabel Budaya (X1)

Berdasarkan hasil kuesioner yang penulis sebarakan berikut, dapat dilihat tanggapan responden mengenai budaya di PPK desa tanah bekali. Budaya yang akan di bahas disini meliputi lima indikator penelitian sebagai berikut:

**Tabel V.5: Tanggapan Responden Penyebab Peminjam Tersebut Tidak Bertanggung Jawab dalam Melunasi Kewajibannya disebabkan Kurang Lancarnya usaha yang dikelola.**

No	Alternative jawaban	Frekuensi	Persentase%
1	Sangat setuju	20	52.63 %
2	Setuju	11	28.94 %
3	Netral	7	18.42 %
4	Tidak setuju	0	0
5	Sangat tidak setuju	0	0
	<b>Jumlah</b>	<b>38</b>	<b>100%</b>

Sumber: *Data Olahan, 2010*

Sumber: Dari data diatas dapat diketahui bahwa peminjam yang tidak bertanggung jawab. Melunasi kewajibannya kepada PPK yang memilih sangat setuju sebanyak 20 orang responden(52.63%), yang memilih setuju sebanyak 11 orang responden (28.94%), memilih netral sebanyak 7 orang responden(18.42%).

**Tabel V.6 : Tanggapan Responden Tentang Pelayanan Yang di Berikan Oleh Karyawan PPK Suda Sesuai Dengan Budaya Setempat.**

No	Alternative jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Sangat setuju	9	23.68%
2	Setuju	11	28.94%
3	Netral	10	26.31%
4	Tidak setuju	6	15.78%
5	Sangat tidak setuju	2	5.26%
	<b>Jumlah</b>	<b>38</b>	<b>100%</b>

Sumber: *Data Olahan, 2010*

Dari data diatas dapat diketahui bahwa penilaian responden tentang pelayanan yang diberikan PPK desa tanah bekali pangean kepada nasabah suda sesuai dengan budaya setempat, yakni responden memilih sangat setuju sebanyak

9 orang responden (23.68%), yang memilih setuju sebanyak 11 orang (28.94), memilih netral sebanyak 10 orang responden (26.31%) memilih tidak setuju 6 orang responden (15.78%) dan memilih tidak setuju sebanyak 2 orang responden (5.26%).

**Tabel V.7: Tanggapan Responden Tentang Peminjam Tersebut disiplin Dalam Membayar Anggsuranya Dari Pinjaman dana PPK.**

No	Alternative jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Sangat setuju	4	10.52%
2	Setuju	10	26.31%
3	Netral	17	44.73%
4	Tidak setuju	6	15.78%
5	Sangat tidak setuju	1	1.7%
	<b>Jumlah</b>	<b>38</b>	<b>100%</b>

Sumber: *Data Olahan, 2010*

Dari data diatas dapat diketahui bahwa penilaian responden tentang disiplin dalam membayar angsuran. Kapada PPK, yakni responden memilih sangat setuju sebanyak 4 orang responden (10.52%), yang memilih setuju sebanyak 10 orang (26.31%), memilih netral sebanyak 17 orang responden (44.73%) memilih tidak setuju sebanyak 6 orang responden (15.78%) dan memilih sangat tidak setuju sebanyak 1 orang (1.7%).

**Tabel V.8: Tanggapan Responden Tentang Analisis Kredit Oleh Tim Verifikasi Suda dijalankan Dengan Baik Sebelum diluncurkan kepada Kelompok /Anggota Peminjam**

No	Alternative jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Sangat setuju	17	44.73%
2	Setuju	9	23.68%
3	Netral	9	23.68%
4	Tidak setuju	1	2.63%
5	Sangat tidak setuju	2	5.26%
	<b>Jumlah</b>	<b>38</b>	<b>100%</b>

Sumber: *Data Olahan, 2010*

Dari data di atas dapat diketahui bahwa penilaian responden tentang Analisis kredit oleh tim Verifikasi sudah dijalankan dengan baik sebelum diluncurkan kepada kelompok /anggota peminjam. yakni responden memilih sangat setuju sebanyak 17 orang responden (44.73%), yang memilih setuju sebanyak 9 orang (23.68%), memilih netral sebanyak 9 orang responden (23.68%) memilih tidak setuju sebanyak 1 orang responden (2.63%) dan memilih sangat tidak setuju sebanyak 2 orang (5.26%).

**Tabel V.9: Tanggapan Responden Tentang Kesadaran debitur Dalam Membayar atau Melunasi Hutangnya kepada PPK Sudah Sangat Baik.**

No	Alternative jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Sangat setuju	6	15.78%
2	Setuju	8	21.05%
3	Netral	25	52.65%
4	Tidak setuju	0	0
5	Sangat tidak setuju	0	0
	<b>Jumlah</b>	<b>38</b>	<b>100%</b>

Sumber: *Data Olahan, 2010*

Dari data di atas dapat diketahui bahwa penilaian responden tentang kesadaran debitur dalam membayar atau melunasi utangnya kepada PPK Sudah Sangat Baik. Yakni responden memilih sangat setuju sebanyak 6 orang responden (15.78%), yang memilih setuju sebanyak 8 orang (21.05%), dan memilih netral sebanyak 25 orang responden (52.65%).

### 5.2.2 Kepribadian

Pada variabel *Kepribadian*(X2) diwakili oleh 5 pertanyaan yang mencerminkan indikator. Dalam variabel diajukan pertanyaan kepada responden, sedangkan frekuensinya sebagai berikut.

**Tabel V.10: Tanggapan Responden Tentang Debitur PPK di Pangean Rata-rata Mempunyai Pendidikan Yang Tinggi.**

No	Alternative jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Sangat setuju	15	22.05%
2	Setuju	10	26.31%
3	Netral	13	34.21%
4	Tidak setuju	0	0
5	Sangat tidak setuju	0	0
	<b>Jumlah</b>	<b>38</b>	<b>100%</b>

Sumber: *Data Olahan, 2010*

Dari data diatas dapat diketahui bahwa penilaian responden tentang tanggapan responden tentang debitur PPK di pangean rata-rata mempunyai pendidikan yang tinggi. Responden memilih sangat setuju sebanyak 15 orang responden (22.05%), yang memilih setuju sebanyak 10 orang responden (26.31%), dan memilih netral sebanyak 13 orang responden (34.21%).

**Tabel V.11: Tanggapan Responden Tentang Syarat-syarat Yang Muda Tertarik Untuk Meminjam Dana Kepada PPK.**

No	Alternative jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Sangat setuju	4	10.52%
2	Setuju	21	55.26%
3	Netral	7	18.42%
4	Tidak setuju	6	15.78%
5	Sangat tidak setuju	0	0
	<b>Jumlah</b>	<b>38</b>	<b>100%</b>

Sumber: *Data Olahan, 2010*

Dari data diatas dapat diketahui bahwa penilaian responden tentang syarat-syarat yang mudah tertarik untuk meminjam dana kepada PPK. responden

memilih sangat setuju sebanyak 4 orang responden (10.52%), yang memilih setuju sebanyak 21 orang responden (55.26%), memilih netral sebanyak 7 orang responden (18.42%) dan yang memilih tidak setuju sebanyak 6 responden (15.78%).

**Tabel V.12: Tanggapan Responden Tentang Saksi-saksi Yang di Terapkan Oleh PPK.**

No	Alternative jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Sangat setuju	12	31.57%
2	Setuju	10	26.31%
3	Netral	16	42.10%
4	Tidak setuju	0	0
5	Sangat tidak setuju	0	0
	<b>Jumlah</b>	<b>38</b>	<b>100%</b>

Sumber: *Data Olahan, 2010*

Dari data di atas dapat diketahui bahwa penilaian responden tentang saksi-saksi yang di terapkan oleh PPK, Responden memilih sangat setuju sebanyak 12 orang responden (31.57%), yang memilih setuju sebanyak 10 orang responden (26.31%), dan memilih netral sebanyak 16 orang responden (42.10%).

**Tabel V.13: Tanggapan Responden Tentang Kebijakan Dalam Mengumpulkan Piutang Oleh PPK Sudah Baik.**

No	Alternative jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Sangat setuju	4	10.52%
2	Setuju	18	47.36%
3	Netral	12	31.57%
4	Tidak setuju	3	7.89%
5	Sangat tidak setuju	1	2.63%
	<b>Jumlah</b>	<b>38</b>	<b>100%</b>

Sumber: *Data Olahan, 2010*

Dari data di atas dapat diketahui bahwa penilaian responden tentang kebijakan dalam mengumpulkan piutang oleh PPK sudah baik. responden memilih sangat setuju sebanyak 4 orang responden (10.52%), yang memilih setuju

sebanyak 18 orang responden (47.36%), memilih netral sebanyak 12 orang responden (31.57%), memilih tidak setuju sebanyak 3 responden (7.89%), dan memilih tidak setuju sebanyak 1 orang responden (2.63%).

**Tabel V.14 : Tanggapan Responden Tentang Kegiatan Politik Berpengaruh terhadap Simpan pinjam di PPK.**

No	Alternative jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Sangat setuju	6	15.78%
2	Setuju	8	21.05%
3	Netral	13	34.21%
4	Tidak setuju	7	18.42%
5	Sangat tidak setuju	4	10.52%
	<b>Jumlah</b>	<b>38</b>	<b>100%</b>

Sumber: *Data Olahan, 2010*

Dari data di atas dapat diketahui bahwa penilaian responden tentang kegiatan politik berpengaruh terhadap simpan pinjam di PPK. responden memilih sangat setuju sebanyak 6 orang responden (15.78%), yang memilih setuju sebanyak 8 orang responden (21.05%), memilih netral sebanyak 13 orang responden (34.21%), memilih tidak setuju sebanyak 7 responden (18.42%), dan memilih tidak setuju sebanyak 4 orang responden (10.52%).

### 5.2.3 Kelas Sosial

Pada variabel *Kelas Sosial* (X3) diwakili oleh 5 pertanyaan yang mencerminkan indikator. Dalam variabel diajukan pertanyaan kepada responden, sedangkan frekuensinya sebagai berikut.

**Tabel V.15: Tanggapan Responden Tentang Ketua LKMD jarang memantau pelaksana kegiatan PPK di desa disebabkan oleh kesibukan kegiatan diluar PPK.**

No	Alternative jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Sangat setuju	5	13.15%



2	Setuju	8	21.05%
3	Netral	12	31.57%
4	Tidak setuju	9	23.68%
5	Sangat tidak setuju	4	10.52%
	<b>Jumlah</b>	<b>38</b>	<b>100%</b>

Sumber: *Data Olahan, 2010*

Dari data diatas dapat diketahui bahwa penilaian responden tentang ketua LKMD jarang memantau pelaksana kegiatan PPK di desa disebabkan oleh kesibukan kegiatan diluar PPK. responden memilih sangat setuju sebanyak 5 orang responden (13.15%), yang memilih setuju sebanyak 8 orang responden (21.05%), memilih netral sebanyak 12 orang responden (31.57%), memilih tidak setuju sebanyak 9 responden (23.68%), dan memilih tidak setuju sebanyak 4 orang responden (10.52%).

**Tabel V.16: Tanggapan Responden Tentang ketua 1 LKMD sebagai penanggung jawab memberikan motivasi bila terjadi masalah dalam menjalankan kegiatan usahanya.**

No	Alternative jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Sangat setuju	3	37.5%
2	Setuju	21	55.26%
3	Netral	7	18.42%
4	Tidak setuju	7	18.42%
5	Sangat tidak setuju	0	0
	<b>Jumlah</b>	<b>38</b>	<b>100%</b>

Sumber: *Data Olahan, 2010*

Dari data diatas dapat diketahui bahwa penilaian responden tentang ketua 1 LKMD sebagai penanggung jawab memberikan motivasi bila terjadi masalah dalam menjalankan kegiatan usahanya. responden memilih sangat setuju sebanyak 3 orang responden (37.5%), yang memilih setuju sebanyak 21orang responden (55.26%), memilih netral sebanyak 7orang responden (18.42%), dan memilih tidak setuju sebanyak 7 responden (18.42%).



**Tabel V.17 : Tanggapan responden tentang menyebabkan peminjam tidak bertanggung jawab dalam melunasi kewajibannya disebabkan kurang lancarnya usaha yang dikelola.**

No	Alternative jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Sangat setuju	21	55.26%
2	Setuju	7	18.42%
3	Netral	7	18.42%
4	Tidak setuju	2	5.26%
5	Sangat tidak setuju	1	2.63%
	<b>Jumlah</b>	<b>38</b>	<b>100%</b>

Sumber: *Data Olahan, 2010*

Dari data di atas dapat diketahui bahwa penilaian responden tentang menyebabkan peminjam tidak bertanggung jawab dalam melunasi kewajibannya disebabkan kurang lancarnya usaha yang dikelola, responden memilih sangat setuju sebanyak 21 orang responden (55.26%), yang memilih setuju sebanyak 7 orang responden (18.42%), memilih netral sebanyak 7 orang responden (18.42%), memilih tidak setuju sebanyak 2 responden (5.26%), dan memilih tidak setuju sebanyak 1 orang responden (2.63%).

**Tabel V.18: Tanggapan responden tentang evaluasi pendapatan dari pinjaman dana bergulir PPK untuk kegiatan usaha .**

No	Alternative jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Sangat setuju	15	39.47%
2	Setuju	18	47.36%
3	Netral	5	13.15%
4	Tidak setuju	0	0
5	Sangat tidak setuju	0	0
	<b>Jumlah</b>	<b>38</b>	<b>100%</b>

Sumber: *Data Olahan, 2010*

Dari data di atas dapat diketahui bahwa penilaian responden tentang evaluasi pendapatan dari pinjaman dana bergulir PPK untuk kegiatan usaha, responden memilih sangat setuju sebanyak 15 orang responden (39.47%), yang

memilih setuju sebanyak 18 orang responden (47.36%), dan memilih netral sebanyak 5 orang responden (13.15%).

**Tabel V.19: Tanggapan responden tentang pembiayaan/modal yang lebih besar yang digunakan nasabah dalam menjalankan usaha bersumber dari PPK.**

No	Alternative jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Sangat setuju	3	7.89%
2	Setuju	7	18.42%
3	Netral	15	39.47%
4	Tidak setuju	9	23.68%
5	Sangat tidak setuju	4	10.52%
	<b>Jumlah</b>	<b>38</b>	<b>100%</b>

Sumber: Data Olahan, 2010

Dari data di atas dapat diketahui bahwa penilaian responden tentang pembiayaan/modal yang lebih besar yang digunakan nasabah dalam menjalankan usaha bersumber dari PPK. responden memilih sangat setuju sebanyak 3 orang responden (7.89%), yang memilih setuju sebanyak 7 orang responden (18.42%), memilih netral sebanyak 15 orang responden (39.47%), memilih tidak setuju sebanyak 9 responden (23.68%), dan memilih tidak setuju sebanyak 4 orang responden (10.52%).

#### 5.2.4 Kredit Macet

Pada variabel *Kredit Macet* (Y) diwakili oleh 5 pertanyaan yang mencerminkan indikator. Dalam variabel diajukan pertanyaan kepada responden, sedangkan frekuensinya sebagai berikut.

**Tabel V.20: Tanggapan Responden Tentang Peraturan dan Perjanjian Kredit di PPK Desa Tanah Bekali Pangean sudah dibuat secara jelas.**

No	Alternative jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Sangat setuju	12	31.57%
2	Setuju	16	42.10%
3	Netral	7	18.42%
4	Tidak setuju	3	7.89%
5	Sangat tidak setuju	0	0
	<b>Jumlah</b>	<b>38</b>	<b>100%</b>

Sumber: *Data Olahan, 2010*

Dari data di atas dapat diketahui bahwa penilaian responden tentang Peraturan dan Perjanjian Kredit di PPK Desa Tanah Bekali Pangean sudah dibuat secara jelas. Responden memilih sangat setuju sebanyak 12 orang responden (31.57%), yang memilih setuju sebanyak 16 orang responden (42.10%), memilih netral sebanyak 7 orang responden (18.42%), dan memilih tidak setuju sebanyak 3 responden (7.89%).

**Tabel V.21: Tanggapan Responden Tentang Peraturan Perjanjian Kredit dibuat pada Tingkat kecamatan dan kelompok.**

No	Alternative jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Sangat setuju	11	28.94%
2	Setuju	13	34.21%
3	Netral	14	36.84%
4	Tidak setuju	0	0
5	Sangat tidak setuju	0	0
	<b>Jumlah</b>	<b>38</b>	<b>100%</b>

Sumber: *Data Olahan, 2010*

Dari data di atas dapat diketahui bahwa penilaian responden tentang peraturan perjanjian kredit dibuat pada Tingkat kecamatan dan kelompok. Responden memilih sangat setuju sebanyak 11 orang responden (28.94%), yang memilih setuju sebanyak 13 orang responden (34.21%), dan memilih netral sebanyak 14 orang responden (36.84%).

**Tabel V.22: Tanggapan esponden tentang pihak PPK selalu tanggap dalam menghadapi kredit bermasala.**

No	Alternative jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Sangat setuju	6	15.780%
2	Setuju	21	55.26%
3	Netral	10	26.31%
4	Tidak setuju	1	2.63%
5	Sangat tidak setuju	0	0
	<b>Jumlah</b>	<b>38</b>	<b>100%</b>

Sumber: *Data Olahan, 2010*

Dari data di atas dapat diketahui bahwa penilaian responden tentang pihak PPK selalu tanggap dalam menghadapi kredit bermasalah. Responden memilih sangat setuju sebanyak 6 orang responden (15.78%), yang memilih setuju sebanyak 21 orang responden (55.26%), memilih netral sebanyak 10 orang responden (26.31%), dan memilih tidak setuju sebanyak 1 responden (2.63%).

**Tabel V.23: Tanggapan responden tentang setiap pemberian kredit di PPK. harus menandatangani perjanjian tertulis antara kreditur dan debitur( akad kredit)**

No	Alternative jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Sangat setuju	25	68.78%
2	Setuju	5	13.15%
3	Netral	8	21.05%
4	Tidak setuju	0	0
5	Sangat tidak setuju	0	0
	<b>Jumlah</b>	<b>38</b>	<b>100%</b>

Sumber: *Data Olahan, 2010*

Dari data di atas dapat diketahui bahwa penilaian responden tentang setiap pemberian kredit di PPK. harus menandatangani perjanjian tertulis antara kreditur dan debitur( akad). Responden memilih sangat setuju sebanyak 25 orang responden (68.78%), yang memilih setuju sebanyak 5 orang responden (13.15%), dan memilih netral sebanyak 8 orang responden (21.05%).

**Tabel V.24: Tanggapan Responden Tentang Penyaluran kredit di PPK Pada Tahun 2009 Suda Tercapai Target.**

No	Alternative jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Sangat setuju	6	15.78%
2	Setuju	9	23.68%
3	Netral	10	26.31%
4	Tidak setuju	7	18.42%
5	Sangat tidak setuju	6	15.78%
	<b>Jumlah</b>	<b>38</b>	<b>100%</b>

Sumber: *Data Olahan, 2010*

Dari data diata dapat diketahui bahwa penilaian responden tentang penyaluran kredit di PPK Pada Tahun 2009 suda tercapai target. Responden memilih sangat setuju sebanyak 6 orang responden (15.78%), yang memilih setuju sebanyak 9 orang responden (23.68%), memilih netral sebanyak 10 orang responden (26.31%), memilih tidak setuju sebanyak 7 responden (18.42%). Dan yang memilih sangat tidak setuju 6 orang responden (15.78%).

### 5.3. Upaya Pihak Pelaksana PPK Dalam Mengatasi Kredit Macet

Terjadinya kredit macet/tunggakan dalam pembayaran angsuran, akibat tidak diterapkan sanksi PPK di tingkat desa, sesuai dengan hasil forum UDKP (Unit Daerah Kerja Pembagunan) kelompok tani dikenai sanksi PPK di tingkat kecamatan, yaitu tidak mendapatkan dana perguliran selanjutnya. Dana perguliran artinya pengembalian pinjaman dana PPK dari anggota/kelompok peminjam kepada UPK, dipinjamkan kembali dana modal usaha tersebut kepada masyarakat, baik yang suda perna maupun yang belum perna mendapatkan pinjaman.

Akibat terjadinya tunggakan/kredit macet oleh kelompok tani ,memberikan dampak negatif, yaitu : jika terjadinya kredit macet/tunggakan pada satu atau beberapa orang anggota suatu kelompok, memberikan dampak terhadap seluruh

kelompok yang ada di desa tanah bekali, yaitu kelompok tani tidak diikutsertakan berpartisipasi dalam penguliran karena dinilai desa yang lalai dalam menerapkan sanksi-sanksi yang ada.

Terjadinya kredit macet/tunggakan bagi anggota/kelompok yang menerima dana PPK, maka pihak pelaksana PPK melakukan tindakan penyelamat kredit tersebut. Penyelamat kredit sangat penting agar kelangsungan pemberian kredit kepada masyarakat dari dana PPK bisa berjalan lancar dan jumlah dana PPK bisa meningkat. Penyelamat kredit sangat beragam. Dikatakan beragam karena dilihat terlebih dahulu penyebabnya.

Langkah yang dilakukan dalam penyelamat kredit oleh pihak pelaksana PPK ialah dilihat dari faktor penyebabnya. Kalau disebabkan oleh Force Majeure (jika terjadi suatu peristiwa di luar dugaan atau kemampuan pengendalian kelompok masyarakat penerima pinjaman dana PPK yang menyebabkan terjadinya keadaan yang tidak memungkinkan pengembalian pinjaman atau pemenuhan kewajiban, seperti kerusakan atau kekacauan sipil, kebakaran, bencana alam akibat gempa bumi, angin topan, banjir atau kondisi cuaca yang merugikan, wabah/hama penyakit dan sejenisnya), maka pengambilan tindakan penyelesaian kewajiban diputuskan dalam musawarah Forum UDKP dihadiri oleh TK-PPK Kabupaten (Tim Koordinasi PPK Kabupaten).

Penyelamat kredit yang disebabkan Force Majeure sesuai dengan kesepakatan. Kesepakatan tersebut bisa berupa:

1. Pemutihan bunga, artinya anggota /kelompok peminjam hanya membayar uang pokoknya saja sedangkan jasa pinjaman/hunga tidak.
2. Memperpanjang jangka waktu pengembalian.

Karena pihak pelaksana PPK (Ketua 1 LKMD ) di desa tidak disiplin dalam menerapkan sanksi, mengakibatkan terjadinya kredit macet yang dilakukan 13 orang peminjam dari anggota kelompok tani yang mengakibatkan 25 orang peminjam lainnya terlantar akibat kelalaian (Tidak Force Majeure), maka pihak pelaksana PPK di tingkat kecamatan melakukan penyelamatan kredit yaitu sesuai dengan forum UDKP ialah menerapkan sistem *tanggung renteng*, maksud nya ialah suatu atau beberapa orang yang berbuat kesalahan/tunggakan menjadi beban bagi kelompok yang bersangkutan yaitu mereka (semua anggota kelompok) harus menanggung semua tunggakan anggota yang menunggak.

#### 5.4. Uji Validitas Dan Reabilitas

Pada uji validitas dan reabilitas, sampel yang digunakan sebanyak 38 responden. Untuk menentukan nilai  $r$  tabel digunakan  $df = \text{jumlah kasus} - 2$  yang berarti  $df = 38 - 2 = 36$  dari tabel  $r$  satu sisi dengan alpha 5% diketahui  $df$  sebesar  $r = 0.270$

Dalam penelitian ini pengukuran reabilitas menggunakan uji cronbach alpha( $\alpha$ ) yaitu jika  $\alpha > 0,60$  maka dikatakan reliable.

**Table V.25: Hasil Analisis Validitas Kuisioner Budaya**

Variabel	Nilai $r$ tabel	Nilai $r$ hasil	Kesimpulan
Kredit macet 1	0.270	0.490	Valid
Kredit macet 2	0.270	0.650	Valid
Kredit macet 3	0.270	0.686	Valid
Kredit macet 4	0.270	0.672	Valid
Kredit macet 5	0.270	0.685	Valid

Sumber: Data Olahan, 2010

Dari kelima pertanyaan dalam variabel kredit macet bahwa kelima butir pertanyaan mempunyai nilai  $r$  hasil diatas  $r$  tabel 0,270 dengan tingkat signifikan



5% yaitu untuk pertanyaan kredit macet1 r hasilnya  $0,490 > 0,270$  tabel, kredit macet2 r hasilnya  $0,650 > 0,270$  r tabel, kredit macet 3 hasilnya sebesar  $0,686 > 0,270$  r tabel, kredit macet4 r hasilnya sebesar  $0,672 > 0,270$  r tabel, dan kredit macet5 r hasilnya sebesar  $0,685 > 0,270$ , sehingga kelima pertanyaannya pada valid.

**Table V.26: Hasil Analisis Validitas Kuisioner Budaya**

Variabel	Nilai r tabel	Nilai r hasil	Kesimpulan
Budaya 1	0.270	0.530	Valid
Budaya 2	0.270	0.687	Valid
Budaya 3	0.270	0.659	Valid
Budaya 4	0.270	0.720	Valid
Budaya 5	0.270	0.616	Valid

Sumber: *Data Olahan, 2010*

Dari kelima pertanyaan dalam variabel budaya bahwa kelima butir pertanyaan mempunyai nilai r hasil diatas r table 0,270 dengan tingkat signifikan 5% yaitu untuk pertanyaan budaya 1 r hasilnya  $0,530 > 0,270$  r tabel, budaya 2 r hasilnya  $0,687 > 0,270$  r tabel, Budaya 3 hasilnya sebesar  $0,659 > 0,270$  r tabel, budaya 4 r hasilnya sebesar  $0,720 > 0,270$  r tabel, dan budaya 5 r hasilnya sebesar  $0,616 > 0,270$ , sehingga kelima pertanyaannya pada valid.

**Tabel V.27: Hasil Analisis Validitas Kuisioner Kepribadian**

Variabel	Nilai r table	Nilai r hasil	Kesimpulan
Kepribadian 1	0.270	0.277	Valid
Kepribadian 2	0.270	0.491	Valid
Kepribadian 3	0.270	0.361	Valid
Kpribadian 4	0.270	0.397	Valid
kpribadian 5	0.270	0.326	Valid

Sumber: *Data Olahan, 2010*

Dari kelima pernyataan dalam variable kepribadian bahwa kelima butir pernyataan mempunyai nilai r hasil diatas r tabel 0,270 dengan tingkat signifikan



5% yaitu untuk pernyataan *kepribadian 1* r hasilnya sebesar  $0,277 > 0,270$  r tabel, *kepribadian r 2* r hasilnya  $0,491 > 0,270$  r tabel, *kepribadianr 3* r hasilnya sebesar  $0,361 > 0,270$  r tabel, *character 4* r hasilnya sebesar  $0,397 > 0,270$  r tabel, dan *kepribadian 5* r hasilnya  $0,326 > 0,270$  r tabel. Sehingga kelima pernyataan pada valid.

**Tabel V.28: Hasil Analisis Validitas Kuisioner Kelas sosial**

Variabel	Nilai r table	Nilai r hasil	Kesimpulan
Kelas sosial 1	0.270	0.390	Valid
Kelas sosial 2	0.270	0.306	Valid
Kelas sosial 3	0.270	0.575	Valid
Kelas sosial 4	0.270	0.252	In Valid
Kelas sosial 5	0.270	0.371	Valid

Sumber: *Data Olahan, 2010*

Dari kelima pernyataan dalam variable kelas sosial bahwa kelima butir pernyataan mempunyai nilai r hasil diatas r tabel 0,270 dengan tingkat signifikan 5% yaitu untuk pernyataan kelas sosial1 r hasilnya sebesar  $0,390 > 0,270$  r tabel, kelas sosial r 2 r hasilnya  $0,306 > 0,270$  r tabel, kelas sosial 3 r hasilnya sebesar  $0,575 > 0,270$  r tabel, kelas sosial 4 r hasilnya sebesar  $0,252 > 0,270$  r tabel, dan kelas sosial 5 r hasilnya  $0,317 > 0,270$  r tabel. Sehingga dari kelima pernyataan empat yang valid.

**Table V.29: Hasil Uji Reabilitas Kuisioner Seluruh Variabel**

Keterangan	Butir pertanyaan	Yang dipertahankan	Alpha
Kredit macet (Y)	5	5	0.825
Budaya (X1)	5	5	0.838
Kepribadian (X2)	5	5	0.610
Kelas Sosial(X3)	5	5	0.610

Sumber: *Data Olahan, 2010*

Nilai alpha yang digunakan sebagai indikator untuk menganalisis secara umum menggunakan batas 0,5 dengan nilai r tabel sebesar 0,270 maka r hasil  $> r$

tabel yaitu pada variabel kredit macet nilai alpha  $r$  hasilnya sebesar  $0,825 > 0,270$   $r$  tabel, *budaya* nilai alpha  $r$  sebesar  $0,838 > 0,270$   $r$  tabel, *kelas sosial* nilai alpha  $r$  hasilnya sebesar  $0,610 > 0,270$   $r$  tabel, *kepribadian* nilai alpha  $r$  hasilnya sebesar  $0,610 > 0,270$   $r$  tabel,. Sehingga semua butir pertanyaan dalam variabel adalah reabel.

### 5.5. Pembahasan Regresi Linear Berganda

Untuk mencari hubungan antara variabel *budaya* ( $X_1$ ) *kepribadian* ( $X_2$ ), *kelas sosial* ( $X_3$ ) terhadap variabel terikat yaitu kredit macet ( $Y$ ). digunakan teknik analisis data regresi linear berganda (*multiple regression analysis*).

Table V.30: koefisien regresi tentang pengaruh budaya, kepribadian, dan kelas sosial. Terhadap variabel terikat yaitu kredit Macet.

Varaibel	Koefisien regresi	Standar eror	T	Sig
Budaya ( $X_1$ )	0,621	0,154	4,003	0,000
Kepribadian ( $X_2$ )	-0,012	0,086	-0,138	0,891
Kelas Sosial ( $X_3$ )	0,062	0,092	0,676	0,504
Constanta (a)	6,966	4,254	1,638	0,111
R = 0,558				
R square = 0,346				
Adj R <sup>2</sup> = 0,288				
F.ratio = 5,985				
Sig = 0,002				

Berdasarkan tabel diatas diperoleh angka korelasi berganda ( $R$ ) sebesar 0,558 dimana angka tersebut menunjukkan bahwa hubungan antara *budaya*, *kepribadian*, *kelas sosial* terhadap kredit kredit macet ( $Y$ ) berhubungan. Jadi dapat disimpulkan bahwa  $X_1$ ,  $X_2$ ,  $X_3$ , secara bersama-sama mempunyai pengaruh terhadap kredit macet.

Adapun angka adjusted R Square adalah sebesar 0,346 menunjukkan bahwa 28.8% kredit macet ( $Y$ ) dapat diterangkan dengan variabel budaya,

kepribadian, kelas sosial sedangkan sisanya 66,6 % dapat diterangkan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Digunakan teknik analisa regresi berganda (*multiple regression analysis*). Pada penelitian ini adalah untuk mencari hubungan antara variabel bebas yaitu Budaya, Kepribadian, Kelas sosial terhadap variabel terikat yaitu Kredit macet (Y). berdasarkan tabel diatas maka didapat persamaan regresi linear berganda sbb:

$$Y = 6.966 + 0.621X_1 + 0.012X_2 + 0.062X_3$$

1. Nilai konstanta sebesar 6.996 satuan menunjukkan peningkatan kredit macet jika variabel *budaya, kepribadian, kelas sosial* dianggap konstan (*ceteris paribus*).
2. Koefisien regresi variabel Budaya ( $X_1$ )= 2,621 ini menunjukkan besarnya pengaruh variabel tersebut terhadap kredit macet (Y). Tanda positif menunjukkan koefisien arah hubungan yang positif. Dengan arti setiap ada kenaikan pada variabel *Budaya*, maka kredit macet (Y) juga meningkat.
3. Koefisien regresi variabel kelas social ( $X_2$ )= 0,012 ini menunjukkan besarnya pengaruh variabel tersebut terhadap kredit macet (Y). Tanda negatif menunjukkan koefisien arah hubungan yang negatif. Dengan arti setiap ada kenaikan pada variabel kelas sosial, maka penyaluran kredit (Y) akan menurun.
4. Koefisien regresi variabel *kepribadian* ( $X_3$ )= 0,062 ini menunjukkan besarnya pengaruh variabel tersebut terhadap kredit macet (Y). Tanda positif menunjukkan koefisien arah hubungan yang positif. Dengan arti setiap ada kenaikan pada variabel kepribadian, maka penyaluran kredit (Y) juga meningkat.

## 5.6. Uji F ( F test )

Uji F digunakan untuk menguji apakah semua variabel bebas secara bersama-sama (simultan) mempunyai pengaruh terhadap variabel terikat. Untuk membuktikan hal tersebut maka dilakukan uji F, dari hasil perhitungan dengan menggunakan program computer SPSS (dapat dilihat dari tabel anova).

F table dengan signifikan sebesar 10% adalah:

$$\begin{aligned} F \text{ table} &= (k-1); (n-k) \\ &= (4-1); (38-3) \\ &= 3; 35 \\ F &= 2,84 \end{aligned}$$

bahwa nilai F hitung sebesar 5.985 dan pada tabel Distribusi Fisher diketahui nilai F table 2,84 dengan tingkat signifikan (alpha) 5%. Hal ini menunjukkan bahwa nilai F hitung > F table yang berarti hipotesa dapat diterima.

Ho: Faktor Budaya, Kepribadian dan kelas sosial berpengaruh signifikan terhadap kredit macet program PPK (Study kasus) perilaku kelompok tani desa tanah bekali pangan.

Hi: Faktor Budaya, Kelas social, dan Kepribadian berpengaruh signifikan terhadap kredit macet program PPK (Study kasus) perilaku kelompok tani desa tanah bekali pangan.

Ho diterima jika F hitung < F tabel dan hi dapat diterima apabila F hitung > F tabel. Dari hasil perhitungan dengan menggunakan program SPSS versi 17 didapat nilai F hitung sebesar 5.985 dan nilai F tabel Distribusi Fisher dengan tingkat signifikan 5% sebesar 3.32 yang berarti hipotesa dapat diterima.

## 5.7. UJI T( T TEST)

Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat dengan mengukur derajat hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat.

Berdasarkan perhitungan SPSS, maka dapat diketahui hasil analisis koefisien regresi seperti tabel dibawah ini:

**TableV.31: Koefisien Regresi Variabel Bebas Secara Parsial Terhadap Variabel Terikat**

Variabel	t-bitung	t-tabel	Sig
Budaya (X1)	4.033	2.042	0,000
Kepribadian (X2)	-0.138	2.042	0,891
Kelas sosia ( X3)	0.675	2.042	0,504

Sumber: data olahan, 2010

Uji t dilakukan dengan membandingkan t hitung dengan t tabel pada tingkat signifikan 5%.

$$\begin{aligned}T \text{ table} &= \alpha/n ; n-2 \\&= 0,05/2 ; 38-2 \\&= 0,25 ; 36 \\&= 2.042\end{aligned}$$

Pengujian hopotesis, dapat dilihat bahwa nilai t hitung pada masing-masing variable lebih besar dari nilai t tabel, yang berarti bahwa secara parsial masing-masing variabel bebas ( Budaya, Kepribadiandan kelas sosial) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat (Kredit macet).

### 1. *Budaya (x1)*

Nilai  $t_{hitung}$  X1 4.033 dan nilai  $t_{tabel}$  adalah 2.042. Karena  $t_{hitung} > t_{tabel}$  maka  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima. Jadi dapat disimpulkan bahwa variabel ini mempunyai pengaruh signifikan terhadap kredit macet.

## 2. *kepribadian(X2)*

Nilai  $t_{hitung}$  X2 -0.138 dan nilai  $t_{tabel}$  adalah 2.042 Karena  $t_{hitung} < t_{tabel}$  maka  $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak. Jadi dapat disimpulkan bahwa variabel ini mempunyai tidak pengaruh signifikan terhadap kredit macet.

## 3. *kelas sosial(X3)*

Nilai  $t_{hitung}$  X3 0,675 dan nilai  $t_{tabel}$  adalah 2.042 Karena  $t_{hitung} < t_{tabel}$  maka  $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak. kredit. Jadi dapat disimpulkan bahwa variabel ini mempunyai tidak pengaruh signifikan terhadap kredit macet.

## BAB VI

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 6.1. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah penulis lakukan sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan dari apa yang penulis uraikan serta saran bagi program pengembangan kecamatan PPK desa tanah bekalipangean.

1. Budaya terdiri dari lima indikator yaitu kepercayaan, latar belakang nasaba, wakru, dan komunikasi dan bahasa ternyata berpengaruh signifikan terhadap
2. kredit macet program pengembangan kecamatan (PPK).
3. Kelas social terdiri dari kelompok, keluarga, peran status dan pendapatan tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap kredit macet.
4. Kepribadian terdiri dari jenis kelamin, keadaan ekonomi, gaya hidup, pekerjaan dan jabatan dan kepribadian dan konsep diri juga tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap kredit macet.
5. Secara Parsial ( uji t) ini adalah hipotesis diterima apabila T hitung lebih besar T tabel. Adapun t hitung dari masing-masing variabel yaitu:

a. Budaya (X1)

Nilai  $t_{hitung}$  X1 4,033 dan nilai  $t_{tabel}$  adalah 1,638. Karena  $t_{hitung} > t_{tabel}$  maka  $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak. Jadi dapat disimpulkan bahwa variabel ini mempunyai pengaruh signifikan terhadap kredit macet.

b. Kepribadian(X2)

Nilai  $t_{hitung}$  X2 -0,138 dan nilai  $t_{tabel}$  adalah 1,638. Karena  $t_{hitung} > t_{tabel}$  maka  $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak. Jadi dapat disimpulkan bahwa variabel ini mempunyai tidak pengaruh signifikan terhadap kredit macet.

c. Kelas sosial(X3)

Nilai  $t_{hitung}$  X3 0,675 dan nilai  $t_{tabel}$  adalah 1,638. Karena  $t_{hitung} > t_{tabel}$  maka  $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak.. Jadi dapat disimpulkan bahwa variabel ini mempunyai tidak pengaruh signifikan terhadap kredit macet.

6. Penelitian ini menggunakan uji F, hasil penelitian ini dikatakan bermakna apabila F hitung lebih besar dari F tabel. Dari hasil perhitungan dengan menggunakan program SPSS 17 didapat nilai F hitung sebesar 5,985 dan nilai F tabel Distribusi Fisher dengan tingkat signifikan 5% sebesar 3,32 yang berarti hipotesa dapat diterima.
7. Berdasarkan analisis korelasi determinasi R Square ( $Adj R^2$ ), variabel budaya, kelas sosial, dan kepribadian dapat menjelaskan terhadap kredit macet sebesar 71,2% .

## 6.2. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian penulis saran-saran yang kiranya bermanfaat yaitu:

1. Bagi program pengembangan kecamatan (PPK) harus memberikan perhatian yang lebih besar pada aspek kepribadian dan kelas sosial karena kedua aspek tersebut tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan nasabah/anggota.



2. Bagi para peneliti selanjutnya, sebaiknya menggunakan faktor-faktor lain dalam mengangkal permasalahan yang sama.
3. Untuk memperoleh hasil penelitian yang maksimal sesuai dengan yang diharapkan, penelitian selanjutnya sebaiknya menggunakan sampel yang lebih besar dari penelitian sekarang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adinungroho, R Tjitoroadi.2000. *Perbankan masalah perkreditan*. Pradya Paramita, Jakarta.
- Anugraha, Pandji. 2000. *Manajemen Bisnis* Rineka Cipta Semarang.
- Assauri, Sofyan. 2004. *Manajemen Pemasaran*. Raja Grafindo persada. Jakarta.
- Draf, Richard L. 2002. *Manajemen*.Selembah empat.Jakarta.
- Juli Irwanto dan Toni R Hasibuan, 2000, *Bank dan Lembaga Keuangan lainnya*, Universitas Trisakti, Jakarta.
- Kasmir,2001. *Manajemen Perbankan*. Raja Persada. Jakarta.
- \_\_\_\_\_. 2002. *Bank & Lembaga Keuangan Lainnya*. Raja Grafindo Persada. Jakarta
- \_\_\_\_\_. 2002. *Dasar-daisar Perbankan*. Raja Grafindo Persada.Jakarta.
- Ktler, Philip, 2005. *Manajemen Pemasaran*, Edisi Kesebelas Jilid. Alih Bahasa Benyamin Molan. Jakarta Indeks.
- Kuncoro, Mudrajat, 2003. *Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi*. Jakarta: Erlangga.
- Mahmoeddin. 2002. *Melacak Kredit Bermasalah*. Pustaka Sinar Harapan. Jakarta.
- Mangkuncgara. A.A, dan Anwar Prabu. 2000. *Perilaku Konsumen*, Refika Aditama. Bandung.
- Nazir, M, 2003. *Metodelogi Penelitian* Jakarta Indeks
- Rivai, Veitzal dan Andrian Permata Veitzal .2005. *Credit Managemet Hanbook*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Setiadi, J. Nungroho , 2003. *Prilaku Konsumen*. Kencana, Jakarta Timur.

- Siagia, sondang P. 2002. *Manajemen Modren*. Gunung Agung. Jakarta.
- Simongkir OP. 2002. *Riset Pemasaran Bank*. Aksara Persada Press. Jakarta.
- Sinugan. Muchdarsyah. 2000. *Manajemen dan Bank*. Bumi Aksara. Jakarta.
- Suarman, ujung, 2003. *Perilaku Konsumen Teori Penerapan Dalam Pemasaran*,  
Ghalia indonesia Jakarta.
- Sumarni, Murti, 2002. *Manajemen Pemasaran Bank*, Liberty, Jogjakarta
- Sutisna, 2002, *Prilaku Konsumen dan Komunikasi Pemasaran*, Remaja Rosdakarya,  
Bandung.
- Swasta, Basu, 2000. *Perilaku Konsumen*, PT. Rajawali Grafindo, Jakarta,
- Syamsudin Lukman, *Manajemen Keuangan Perusahaan*, PT. Raja Grafindo. Jakarta. 2002.
- Taufik Amir, M , 2005. *Dinamika Pemasaran* Jakarta. PT Rajagrafindo Persada.
- Thomas Suryanto dan Marala Djahapeah, 2003, *Kelombagaan Perbankan*,  
Penerbit, PT. Gramedia Pustaka Utama Jakarta.
- Tim Koordinasi PPK *Manajemen Consultan dan Sekretariat nasional PPK*, Jakarta 2000.
- \_\_\_\_\_, 2007. *Metode Penelitian*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Tim Koordinasi PPK Pusat. *Buku Pegangan Camat PPK*, Jakarta. 2000.
- Tim Koordinasi PPK-Kebijakan *Penyempurnaan Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis*  
*Operasional PPK*. Departemen Dalam Negeri Dan Otonomi Daerah RI. Jakarta.  
2001.
- Tjocka. 2002. *Bank Lembaga Keuangan*. BPFE. Yogyakarta.
- Umar, Husein, 2002. *Riset Pemasaran dan Perilaku Konsumen*, PT. Gramedia  
Pustaka Utama, Jakarta.

Widjaya, Amin 2000. Tanya Jawab Perilaku Konsumen dan Pemasaran Strategi  
Harvindo, Jakarta.

Wimardi.J.2004. *Manajemen Perilaku Organisasi*, Persada Media Jakarta.

Zainul. Arifin. 2002. *Memahami Bank Syariah Lingkup Peluang dan Prospe Bank  
Syariah*. Alfabet. Jakarta.